

BAB I

LATAR BELAKANG PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

Tujuan sebuah reklamasi menurut modul Terapan Pedoman Perencanaan tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007), jelas dikatakan bahwa pemanfaatan kawasan baru tersebut bisa diwujudkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi kawasan wisata terpadu. Namun demikian, sebuah reklamasi mungkin sekali menimbulkan kerugian pada beberapa hal. Adapun kerugiannya antara lain:

- a. Terjadinya perubahan ekosistem pada lingkungan, seperti perubahan pada pola arus erosi pada pantai, sehingga dapat mengakibatkan banjir.
- b. Berdampak buruk pada sistem drainase dan perubahan hidrodinamika yang memiliki dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
- c. Mengganggu lingkungan sekitar karena adanya galian yang dilakukan dengan cara pengeprasan bukit maupun pulau-pulau yang tidak memiliki penghuni.
- d. Beberapa keanekaragaman hayati akan punah seperti hilangnya *species mangrove*, punahnya species ikan, kerang laut, dan sebagainya.

Beberapa kasus penolakan reklamasi di Indonesia bukannya tanpa alasan. Penolakan yang terjadi reklamasi teluk Jakarta antara lain dilakukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Sebagai alasan penolakan adalah beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut. Singkatnya reklamasi akan menimbulkan pencemaran lingkungan, banjir, dan merugikan nelayan karena mereka akan kehilangan wilayah tangkapan dan justru menguntungkan pebisnis (Suara.com, 4 Februari 2016).

Tidak sedikit negara di dunia ini yang sukses melakukan reklamasi. Singapura, Dubai, Korea Selatan, Jepang, dan China, adalah lima negara yang disebut-sebut sukses dalam melaksanakan reklamasi (liputan 6.com, 6 April 2016). Singapura memperluas wilayahnya hingga 70 km persegi untuk menambah kawasan perumahan, industri dan rekreasi (2001). Bahkan negara ini memiliki *concept plant* hingga 50 tahun mendatang. Dubai memperluas wilayahnya hingga 250 km persegi untuk tujuan kepariwisataan. Korea Selatan melakukan reklamasi di Song Do yang memiliki luas 38 ribu hektare untuk tujuan Bandar Internasional

dan kawasan industri. Jepang melalui kawasan Kyoto memperluas 10 km persegi untuk Bandara Internasional. Adapun China melakukan reklamasi di Chao Fe Dian, kawasan pantai Timur Beijing sebagai kawasan industri.

Gb 1: Reklamasi Jepang yang sukses



Di Indonesia, reklamasi teluk Benoa Bali sampai sekarang belum ada titik terang tentang disetujuinya upaya pemerintah ini. Beberapa penolakan gencar dilakukan oleh masyarakat adat dengan alasan adanya kerugian yang akan mereka derita. Aksi penolakan reklamasi diikuti oleh ribuan warga dari 27 desa Adat yang turun ke jalan dengan membawa ogoh-ogoh raksasa untuk menyatakan penolakan. Koordinator aksi di Bali yaitu I Wayan Gendo Suardana mengatakan bahwa warga masih meminta agar pemerintah menghentikan rencana tersebut, termasuk menghentikan proses Amdal dan mencabut Perpres No 51 th 2014 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur soal reklamasi. Penolakan ini ditanggapi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti dengan mengatakan bahwa keputusan akan menunggu sampai amdal proyek reklamasi selesai (www.bbc.com, akses Februari 2017).

Beberapa alasan urgensi yang menolak reklamasi teluk Benoa yang disampaikan oleh masyarakat Adat kepada pemerintah antara lain penyelamatan hutan mangrove, penghentian pendangkalan, penyelamatan habitat/ekosistem teluk dan revitalisasi atau degradasi. Setelah cukup lama rupanya tidak terlihat upaya-upaya secara langsung dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) investor yang berencana mereklamasi teluk Bali. TWBI melakukan upayanya melalui kementerian Koordinator politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Sebelum penerbitan Perpres 51 Tahun 2014, Gubernur Bali telah menerbitkan SK Reklamasi untuk PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI). Penerbitan SK reklamasi tersebut diduga melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 dan Perpres 122 Tahun 2012 yang mengatur bahwa rencana reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 yang mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang, oleh karenanya penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 dianggap bertentangan dengan Pasal 91, PP No. 15 tahun 2010. Penerbitan Perpres 51 tahun 2014 juga tidak melalui proses peninjauan kembali sebagaimana diatur didalam PP No. 15 tahun 2010 sehingga Perpres 51 Tahun 2014 harus segera dibatalkan Presiden.

Selain alasan yuridis, penolakan terhadap rencana reklamasi yang tidak pernah henti sejak tahun 2013 dapat dijadikan sebagai modal besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), menyatakan:

1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA
2. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membatalkan proses AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena proses-prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
3. Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBI pada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.
4. Mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa.

(Sumber:<https://www.google.co.id/search?q=peraturan+presiden+51+tahun+2014&oq=perpres+51+tahun+2014&aqs=chrome.3.69i57j0l5.20300j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> akses 21 September 2018)

Gb 2: Gegap gempita masyarakat menolak perpres 51 th 2014



Gb 3: Masyarakat Bali menolak reformasi



Undangan upaya damai dari TWBI ini diungkap oleh Koordinator Forbali I Wayan Gendo Suardana melalui surat no.Un-422/polhukam/De-III/HK.04.04.I//2016 tertanggal 8 November 2016. Forbali menolak undangan dengan alasan bahwa peserta terdiri dari lembaga masyarakat yang mendukung TWBI sedangkan beberapa lembaga penegakan hukum seperti YLBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) tidak diundang (www.forbali.org, akses Februari 2017).

Keputusan *paruman* Desa Pakraman Denpasar menolak reklamasi Teluk Benoa dengan alasan yakni, menjunjung tinggi Tri Hita Karana, mendukung kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci, mendesak agar kawasan Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi, mendesak para pengambil kebijakan di pusat dan Bali mendengarkan aspirasi masyarakat bali, dan menuntut pencabutan Perpres No. 51 tahun 2014 (<http://www.walhibali.org/category/tolak-reklamasi-teluk-benoa>).

Di tengah pro dan kontra rencana revitalisasi berbasis reklamasi di perairan Teluk Benoa, DPRD Provinsi Bali memberikan 'lampu hijau'. Wakil rakyat menyatakan bahwa reklamasi tersebut bisa dilaksanakan, namun dengan syarat hasil kajian serta dasar hukumnya jelas. Hal ini disampaikan DPRD Provinsi Bali saat berdialog dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata dan Budaya Bali yang berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Bali. Aksi demo mendukung reklamasi ini melibatkan 3.000 orang. Di hadapan perwakilan massa aksi dalam dialog, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan, jadi atau tidaknya reklamasi Teluk Benoa tergantung dasar hukum serta hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Jika keduanya jelas, maka reklamasi dapat dilaksanakan.

Apabila Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 jalan terus, maka tidak ada alasan untuk menolak (reklamasi). Sugawa Korry bahkan menugaskan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Arahan Peraturan Zonasi (APZ) DPRD Provinsi Bali untuk melakukan 2 hal. *Pertama*, Pansus Pembahasan Ranperda APZ segera melakukan konsultasi ke Jakarta terkait Perpres 51/ 2014. *Kedua*, Pansus Pembahasan Ranperda APZ juga ditugaskan untuk mengonsultasikan masalah amdal ke pusat. Meski memberikan 'lampu hijau', Sugawa mengingatkan para pendukung reklamasi bahwa revitalisasi Teluk Benoa belum tentu juga dapat dilaksanakan. Sebab, itu dapat dijalankan jika memenuhi Amdal serta Perpres 51/2014 tidak dicabut. Kalau Perpres 51 ternyata dicabut oleh pemerintah pusat, maka tidak bisa paksakan reklamasi. Begitu juga kalau amdal hasilnya banyak negatif, maka reklamasi tidak dapat dilaksanakan. (<http://news.liputan6.com/read/2217360/dprd-bali-izinkan-reklamasi-teluk-benoa-asalkan>, akses Januari 2017).

Permohonan perpanjangan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI), sudah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PT.TWBI masih bisa berusaha untuk mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Adapun menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan permohonan izin tersebut disetujui, karena aturan yang ada mengharuskan kementeriannya mengambil kebijakan tersebut. Dalam Perpres tentang reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil itu, diatur bahwa penolakan permohonan perpanjangan izin bisa dilakukan KKP, dengan jawaban tertulis. Sedangkan bila permohonan dalam 20 hari tidak ditanggapi, maka KKP dianggap menyetujui dan wajib memperpanjang izin tersebut. Izin lokasi tersebut bukanlah izin untuk melakukan reklamasi, yakni penimbunan laut untuk dijadikan daratan. Izin lokasi

adalah izin untuk mengklaim sebidang lahan di laut. Sedangkan untuk menimbun laut, hal itu dapat dilakukan dengan bermodal izin pelaksanaan, yang juga berhak dikeluarkan oleh KKP. Namun izin pelaksanaan baru bisa dikelularkan bila proyek tersebut sudah mengantongi izin analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (<http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/26/susi-jelaskan-kenapa-izin-lokasi-reklamasi-teluk-benoa-diperpanjang>).

Kericuhan ini juga mengundang perhatian dunia kampus, terutama universitas terbesar di Bali, yaitu Udayana. Universitas Udayana secara resmi mengumumkan hasil kajiannya terhadap rencana reklamasi di Teluk Benoa, perairan strategis di Bali Selatan, oleh investor swasta PT. Tirta Wahana Bali International. Universitas negeri terbesar di Bali itu secara tegas menyatakan bahwa rencana reklamasi di Teluk Benoa tidak layak. Senat memutuskan secara tegas bahwa reklamasi teluk benoa tidak layak. Ketua LPPM Universitas Udayana Ketut Satriawan akan segera menyampaikan hasil kajiannya kepada PT. Tirta Wahana Bali International. Kajian yang dilakukan oleh tim memang dibiayai penuh oleh PT. Tirta Wahana Bali International dengan nilai kontrak Rp 1,094 miliar ([http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/akses Januari 2017](http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/akses%20Januari%202017))

Gb 4: *Taman Hutan Raya Ngurah Rai, salah satu kawasan penting yang akan ikut terdampak jika Teluk Benoa direklamasi. (Foto: Ni Komang Erviani)*



Hasil akhir kajian Universitas Udayana ini tentu saja menjawab pertanyaan masyarakat seputar layak tidaknya rencana proyek reklamasi Teluk Benoa seluas 838 hektar yang hendak dilakukan PT. Tirta Wahana Bali International.

Institusi lain yang cukup memberi perhatian pada kasus ini adalah Institut teknologi Surabaya (ITS). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga menyatakan menolak tawaran kajian reklamasi Teluk Benoa, Bali. (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/13/206753147/its-tolak-tawaran-kajian-reklamasi-teluk-benoa>, akses Pebruari 2017).

Beberapa contoh reklamasi yang terjadi di Indonesia adalah reklamasi pantai di Jakarta Utara dan reklamasi teluk Benoa Bali. Meski pada awalnya, reklamasi pantai di Jakarta utara tidak menimbulkan kontradiktif, tetapi pada akhirnya upaya tersebut mendapatkan penentangan dari masyarakat sekitar. Demikian pula dengan reklamasi teluk Benoa Bali, hingga saat ini juga belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Sikap kontra tersebut tentu saja muncul karena alasan kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar. Rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak untuk diteruskan. Ada 4 aspek yang menjadi dasar, yakni aspek lingkungan, teknis, budaya, dan ekonomi finansial. Keputusan final dari hasil kajian Universitas Udayana itu diambil setelah melalui perdebatan antar anggota senat universitas dalam rapat tertutup selama kurang lebih 3 jam. Adapun ada beberapa alasan urgensi yang menolak reklamasi teluk Benoa yang disampaikan oleh masyarakat Adat kepada pemerintah. Beberapa alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Apakah reklamasi akan menyelamatkan hutan mangrove di teluk Benoa.
- (b) Benarkah proyek reklamasi akan menghentikan pendangkalan.
- (c) Benarkah proyek reklamasi akan menyelamatkan habitat/ekosistem teluk Benoa.
- (d) Apakah reklamasi teluk benoa sebagai revitalisasi atau degradasi.

Dengan demikian hal ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah dalam rangka menciptakan integrasi nasional dan harmoni sosial (*Nation integration & social harmony*). Hal ini termasuk dalam upaya mengoptimalkan strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelesaikan konflik penolakan reklamasi Teluk Benoa tahun 2015-2016. Selama ini upaya strategi komunikasi oleh pemerintah menfokuskan perhatian pada menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah beredudukan sebagai otoritas yang memegang penuh segala upaya untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang bersifat vertikal belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang khusus dalam satu kajian. Dengan demikian

isi buku ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi resolusi konflik yang diambil pemerintah melalui strategi komunikasi yang dilakukan. Strategi komunikasi sebagai upaya menyelesaikan konflik tidak semata-mata hanya melibatkan masyarakat Bali, melainkan juga pemerintah pusat. Masyarakat Provinsi Bali maupun pemerintah saling berhadapan dan masing-masing memiliki argumentasi hukum yang dijadikan rujukan, sehingga diperlukan upaya perencanaan dan komunikasi strategis untuk menyelesaikan konflik yang sudah berjalan tiga tahun tersebut.

BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan strategi komunikasi antara lain: “Peran Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Konflik Antara nelayan”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah ini memfokuskan perhatian pada peran komunikasi persuasif dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/3343> akses tanggal 8 April 2017). Adapun penelitian kedua yang menjadi inspirasi bagi peneliti adalah “*Communication strategies for managing coastal fisheries conflict in Bangladesh*” yang di muat pada jurnal internasional “Science Direct” kategori *Ocean & Coastal Management* 92 (2014) 65-73. Kajian dalam penelitian ini memberikan perhatian pada pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai menyisakan banyak persoalan. Setidaknya permasalahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, konflik kepentingan, nilai kebudayaan, cara eksploitasi dan kekuasaan. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569114000052>, *Ocean & Coastal Management* vol. 92 (2014) 65-73, akses tanggal 9 April 2017) .

Berbagai strategi komunikasi berusaha dilakukan manusia dalam mencapai efektivitas komunikasi. Meski bagaimanapun, sebuah strategi tetap bertumpu pada komponen komunikasi yang terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan, *noise*, dan efek. Menurut Onong Uchjana Effendy (2003) dalam buku berjudul “*Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*” menyatakan bahwa “Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Taktik operasional secara taktis harus dapat dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”. Hal ini senada dengan ungkapan Anwar Arifin (1994) dalam buku “*Strategi Komunikasi*” menyatakan bahwa “sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan kemungkinan dihadapi dimasa depan, guna mencapai efektivitas.

Strategi komunikasi ini memiliki fungsi utama yaitu memperluas pesan atau informasi sehingga dapat dihasilkan komunikasi yang persuasif, instruktif, sistemik, dan yang pasti sangat informatif untuk mendapat hasil optimal. Pencapaian hasil yang optimal akan dapat berhasil dengan melakukan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Kedua hal ini menjadi syarat mutlak dari sebuah strategi komunikasi sebagai panduan yang menunjukkan operasional teknis yang harus dilakukan. Tentu saja bentuk pendekatannya akan berbeda sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

1. Perencanaan Komunikasi

Dalam proses perubahan sosial, pesan-pesan yang terkandung dan dikirim oleh sumber kepada penerima itu berupa ide-ide pembaruan atau inovasi. Namun, unsur terpenting dalam sebuah komunikasi sebelum melakukan transfer pesan adalah melakukan perencanaan yang matang dalam komunikasi agar tidak terdapat *miss communication*. Hafied Cangara (2013) “*Perencanaan dan Strategi komunikasi*” mengungkapkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, atau dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk dengan cara-cara apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menyusun perencanaan yang ideal untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik, maka diperlukan beberapa prinsip yang mendasari rencana tersebut:

- a) Prinsip partisipatif ialah sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.
- b) Prinsip kesinambungan ialah sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
- c) Prinsip holistik artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan.

Dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang berskala nasional bisa berhasil (Effendi, 2003). Pendapat John Middleton dalam Hafied Cangara (2013) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar

pribadi, tapi juga menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Robin Mehall (dalam Cangara, 2013) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan apa, dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.

Hal tersebut dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. *Kedua*, memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa. *Ketiga*, konsentrasi, yaitu dilakukan dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan. *Keempat*, fleksibilitas, yaitu bahwa sebuah strategi diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi fleksibilitas. *Kelima*, kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. *Keenam*, kejujuran, bahwa sebuah strategi dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat tidak terduga. *Ketujuh*, keamanan, bahwa sebuah strategi mesti mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi.

Kemantapan dalam melaksanakan strategi komunikasi, dipengaruhi oleh sejauhmana program dipertautkan dengan komponen-komponen komunikasi yang terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Oleh karenanya, dalam menyusun strategi komunikasi harus memperhitungkan faktor pendukung dan penghambat. Dalam setiap komponen komunikasi, beberapa faktor pendukung dan penghambat terdiri atas (Effendi, 2003) mengenali sasaran komunikasi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, peranan komunikator dalam komunikasi, daya tarik sumber, dan kredibilitas sumber.

Managemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Ada kalanya kita harus mampu untuk memposisikan diri dengan tepat dalam situasi tentunya, kita juga harus mampu menghadapi dan menjalin kerjasama dengan orang lain tanpa mencampurnya dengan urusan pribadi. Ini merupakan sebagian alasan diperlukannya sikap profesional dalam diri kita masing-masing. Konsep managemen dalam perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain. Selain itu, konsep managemen

komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Sebagai contohnya, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam komunikasi agar dapat menjadi seorang komunikator yang memiliki kredibilitas.

Disinilah letak kegunaan mempelajari manajemen komunikasi yang efektif. Manajemen komunikasi menurut Michael Kaye (1994) adalah bagaimana individu atau manusia mengelola proses komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai lingkup komunikasi dengan mengoptimalkan sumber daya komunikasi dan teknologi yang ada. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen karena proses manajemen baru terlaksana, jika komunikasi dilakukan.

Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur formula Lasswell yaitu *Who* (siapa pengirimnya/komunikator), *Say What* (apa yang dikatakan/pesan), *In Which Channel* (saluran komunikasi apa yang digunakan/media), *What Effect* (apa akibat yang ditimbulkan/efek) (Effendi, 2003). Disamping itu untuk melakukan komunikasi yang efektif, dilakukan dengan menganalisa, menyalahkan, menghakimi, menasehati, dan menginterogasi, serta dibutuhkan keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam proses berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu solusi. Sehingga tujuan utama dalam komunikasi yang efektif adalah sebuah *win-win solution*. Tak ada satupun orang yang mau disalahkan. Inilah konsep dasar dari komunikasi efektif.

Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian faktor-faktor komunikasi seperti sumber, pesan, media, penerima, efek, dampak, dan lingkungan dalam konteks intrapersonal, interpersonal, organisasi dan massa agar efektif dan efisien. Dalam manajemen komunikasi harus jelas mengenai rencana yang dirancang kepada siapa yang ditujukan, dan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta bagaimana jika rencana tersebut tidak berjalan lancar sesuai rencana.

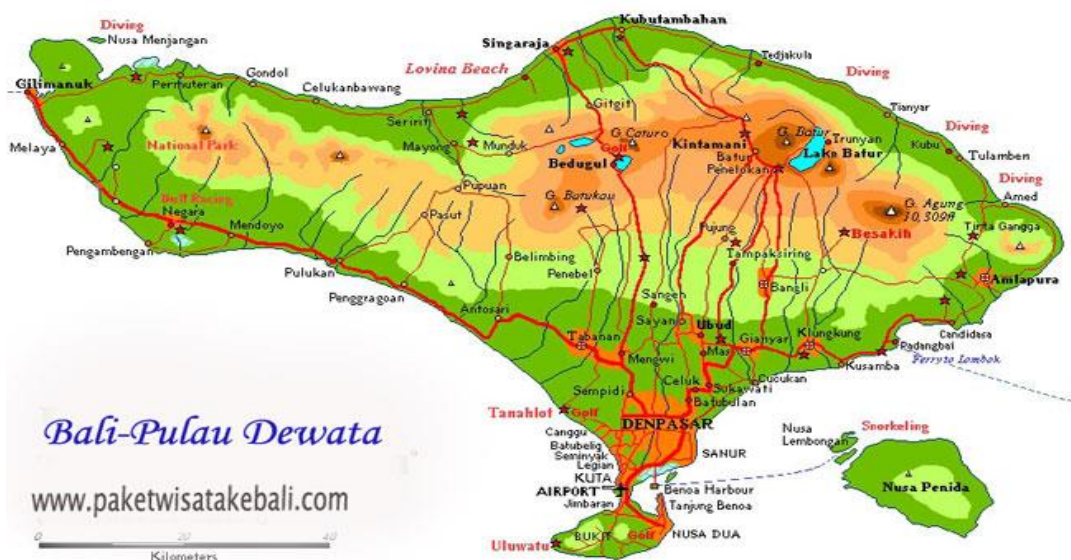
BAB III

BALI MANDARA (BALI AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA)

A. Topografi, Agama, Adat dan Budaya Bali

Bali merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah. Dimana Bali, terkenal akan kekayaan alam, keindahan alam, dan juga budaya yang masih terjaga hingga sekarang. Luas provinsi Bali yang tak sebesar Pulau Jawa nyatanya malah membuat provinsi ini banyak menjadi tujuan destinasi wisata dalam maupun luar negeri. Luas provinsi Bali sendiri sekitar 5.636,66 km² dengan pembagian wilayah Jembrana 841.80, Tabanan 839.33, Badung 418.52, Gianyar 368.00, Klungkung 315.00, Bangli 520.81, Karangasem 839.54, Buleleng 1.365.88, dan Denpasar 127.78. Dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Hindu sebanyak 3.247.283 jiwa (<http://www.baliprov.go.id/v1/topographi>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 42 WIB).

Gb 5: Peta Bali



Sebagian besar wilayah merupakan daerah pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Dari rantai pegunungan tersebut membuat Pulau Bali secara geografis terbagi menjadi dua wilayah yaitu Bali Utara dengan dataran rendah dan sempit dengan Bali Selatan yang mempunyai dataran yang luas dan landai. Bali memiliki ciri geografi yang memiliki kekhasan alam yang indah berupa pegunungan, garis pantai serta kaya akan warisan budaya. Sebagai salah satu provinsi dengan keindahan alam yang mempesona membuat Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tujuan wisatawan baik asing maupun domestik. Jika dilihat dari peta geografis provinsi ini memiliki 6 kabupaten dan satu kota. Hal inilah yang membuat

Bali memiliki konsep pembangunan pariwisata yang berbeda dari provinsi Lain. Sebagaimana penulis kutip dari buku “Bali Mandara”, konsep pariwisata budaya mengantarkan pembangunan daerah Bali berbeda dengan daerah lain, bahkan di dunia. Perkembangan global dengan segala aksesnya membawa konsekuensi munculnya berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Segenap unsur harus siap menghadapi perubahan global tersebut. Di tengah gemerincing dolar atas kemajuan pariwisata, dan sebutan pulau surga, masyarakat Bali masih banyak berada dalam kemiskinan (Putra, 2017).

Kondisi geografi yang memiliki sumberdaya alam yang mempesona diharapkan sejalan lurus dengan peningkatan kualitas hidup sumberdaya manusia baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Bali memiliki eksotisme keindahan alam yang memukau. Di sisi yang lain provinsi ini dihadapkan pada pembangunan global maupun akulturasi budaya yang sangat kuat. Masyarakat Bali bertumbuh seiring datangnya wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan yang mengedepankan sisi ketahanan nasional, baik ketahanan pangan, ketahanan ideologi, ketahanan sipil semua menjadi dasar peletakan pembangunan manusia yang seiring dengan tantangan global yang dihadapi. Provinsi Bali adalah wadah yang sangat diminati untuk dikunjungi sebagai tempat sakral, wisata, maupun warisan kebudayaannya.

Gunung Agung yang di lerengnya terdapat Pura Besakih merupakan pura terbesar di Pulau Bali. Pura tempat pemeluk agama hindu melakukan ritual dan sembahyang kepada penciptanya. Istana Taman Ujung di wilayah Karang Asem yang menyimpan keindahan bangunan kerajaan Bali masa lalu. Pura Ulundanu, Danau Beratan, Tirta Gangga, Tirta Empul semuanya merupakan rangkaian dari pemberian yang maha kuasa untuk Bali dan untuk Indonesia. Disamping masih banyaknya garis pantai yang indah dengan beberapa titik suci yang sangat disakralkan bagi pemeluk agama Hindu khususnya masyarakat Bali. Bali menghormati sesama, Bali menghormati alam dan Bali menghormati sang pencipta alam raya.

Dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu, mereka percaya bahwa bumi dan segala isinya merupakan karunia dari Tuhan yang bisa dimanfaatkan dan dilestarikan. Di dalam agama Hindu juga percaya ada tiga dewa tertinggi yang disebut Trimurti, yaitu *pertama* adalah Dewa Brahma sebagai utusan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. *Kedua* adalah Dewa Wisnu yang dianggap sebagai pemelihara semesta dan segala ciptaan Brahma. Dewa Wisnu akan turun jika di dunia terjadi banyak kejahatan. *Terakhir* adalah Dewa Siwa, yang tugasnya adalah sebagai dewa yang bisa merusak segala ciptaan Brahma

yang sudah rusak. Tidak hanya tiga dewa itu saja, namun masih banyak dewa-dewa lain yang dipercaya umat Hindu (<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2018)

Dengan luas wilayah Pulau Bali, nyatanya Bali mempunyai berbagai macam kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur yang bisa dijadikan daya tarik, bukan hanya untuk wisatawan saja namun juga bagi warga lokal. Sejumlah tradisi yang ada di Bali diantaranya:

1. Tradisi Mekare-kare.

Tradisi ini digelar digelar saat ngusaba kapat (Sasih Sambah). Ritual ini dilakukan bertujuan untuk menghormati Dewa Perang atau Dewa Indra yang merupakan Dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan. Adapun ritualnya seperti berperang satu lawan satu dengan masing-masing orang memegang pandan berduri sebagai senjata.

2. Tradisi Mekotek

Suara “tek-tek” yang dihasilkan dari ketukan kayu yang berbenturan menandai tradisi Mekotek ini. Dimana tradisi ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali tepatnya saat peringatan Hari Raya Kuningan yang bertujuan untuk tolak bala, melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan kepada sang pencipta (<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2017)

Kedua tradisi tersebut sesungguhnya menggambarkan secara jelas bahwa kehidupan adat istiadat di Provinsi Bali masih sangat dijunjung tinggi. Kehidupan sosial masyarakat Bali tidak bisa terlepas dari nilai adat yang secara turun temurun diwariskan sebagai *local wisdom* maupun *heritage*. Tradisi mekare-kare adalah lambang bahwa masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi ideologi dan ajaran agama Hindu sebagai penghormatan atas Trimurti atau dikenal dengan tiga dewa utama yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu maupun Dewa Siwa. Adapun tradisi mekotek dilakukan bersamaan dengan Hari Raya Kuningan. Tradisi ini dipercaya masyarakat Bali sebagai sarana pemujaan kepada dewa untuk menolak segala balak yang mungkin bisa menimpa masyarakat Bali.

B. Konsep Tri Hita Karana

Bali sebagai salah satu destinasi di Indonesia yang memiliki kearifan tradisional dan adat istiadat yang masih kental. Seluruh masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah dikenal secara universal dalam konsep Tri Hita Karana. Keanekaragaman alam, budaya, dan seni yang khas di pulau

Bali tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan atau peribadatan masyarakatnya sebagai bentuk sikap kepatuhan yang diyakini. Dalam setiap program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali selalu berpedoman pada konsep keseimbangan “Tri Hita Karana” yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan. Dengan berpedoman pada konsep tersebutlah, sampai saat ini pariwisata internasional maupun domestik masih menyimpan kepercayaan terhadap Bali (Putra, 2017).

Konsep keseimbangan hubungan inilah yang menjadi ruh pembangunan Provinsi Bali. Bali yang indah dengan potensi alam yang menawan harus senantiasa dijaga untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Pantai harus dijaga kebersihan dan keindahannya, begitu juga dengan pengelola sumber daya alam Bali harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun tidak merusak. Pembangunan jalan tol misalnya tetap memelihara estetika dan tidak merusak keindahan maupun bertentangan dengan titik suci umat Hindu. Optimalisasi daya dukung terhadap sektor pertanian maupun perikanan dilakukan secara masif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hayati. Inilah yang merupakan sisi unik dari Pulau Bali yang masih sangat berpegang teguh kepada Tri Hita Karana yang mana masyarakat Bali menyadari betul bahwa budaya Bali dan elemen-elemennya harus tetap dilestarikan walaupun zaman terus berkembang.

Konsep Tri Hita Karana juga disampaikan oleh I Ketut Wiyana dalam bukunya yang berjudul “*Menuju Bali Jaghadita*” dalam Kitab Baghawad III. Di dalamnya dinyatakan bahwa yadnyalah yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa (Prajapati), manusia (Praja) dan alam atau kamad (Wiyana, 2004). Konsep tersebut memberikan pemahaman bahwa Tri Hita Karana adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup apabila mampu menjaga hubungan yang harmonis berdasarkan yadnya (ritual/korban suci) kepada Idha Sang Hyang Widhi dalam wujud bakti kepada sesama manusia dalam wujud pengabdian dan kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh cinta dan kasih.

Aspek inilah yang memberikan gambaran bahwa Tri Hita Karana tidak hanya sekedar nilai semata tetapi keyakinan yang senantiasa menjadi patokan bertindak bagi masyarakat Bali. Seseorang yang berada dalam lingkup kekuasaan maupun rakyat harus bersatu padu menjaga harmonisasi pada keyakinan mengimplementasikan ketertundukan pada sang pencipta, membangun, menjaga hubungan dengan sesama manusia pada tingkatan individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Manusia memiliki kewajiban menanamkan nilai luhur yang

digariskan Sang Hyang Widhi dengan tetap menjaga seluruh warisan budaya dan adat, ataupun keindahan alam beserta estetikanya.

Dalam konteks implementasi tata ruang maupun pembangunan wilayah, konsep ini menjadi pilar dasar peletakan arah kebijakan. Adalah tidak dikatakan sejalan dengan Tri Hita Karana manakala pembangunan manusia justru merusak keseimbangan alam. Bali yang mampu menjadi primadona wisata dunia karena keteraturan yang dijaga antara pembangunan wilayah, pembangunan manusia maupun hubungan keyakinannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam ajarannya. Dengan kata lain upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tidak boleh tercerabut dari nilai dasar falsafah ini. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang “menyame braye” yaitu mereka adalah satu ikatan persaudaraan. Antara satu dengan yang lain tidak boleh menyebabkan pertentangan yang menimbulkan kekacauan. Masyarakat Bali harus selalu berupaya untuk mengkaji suatu kebijakan yang diletakkan pada nilai Tri Hita Karana. Potensi wisata yang begitu besar dengan pertumbuhan manusia yang memiliki tingkat peradaban tinggi adalah ujung tonggak pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Dalam beberapa kesempatan agar hubungan antara manusia dengan alam tidak mengalami disorientasi maka dilakukan kajian terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Bali. Begitu juga dengan kebijakan reklamasi yang telah di tandatangani pemerintah pusat senantiasa melihat nilai-nilai tersebut. Tri Hita Karana dapat dilihat dari perspektif hukum Indonesia, sebagai tingkat keseimbangan alam yang terjaga. Beberapa hal tersebut data terlihat dari pernyataan Pemerintah Provinsi Bali terkait kajian reklamasi Teluk Benoa. Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara khusus menyampaikan apresiasi dan terimakasih terhadap berbagai masukan baik berupa saran maupun kritik terkait rencana reklamasi Teluk Benoa yang mengemuka pada diskusi terbuka di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Khusus terkait SK Nomor : 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, tim hukum gubernur mulai bergerak untuk mempelajari serta mendalami berbagai pendapat yang berkembang. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali yaitu I Ketut Teneng. Setelah digodok secara intern, nantinya Pemprov Bali juga akan membahasnya dengan DPRD Bali dan mengundang sejumlah komponen dan praktisi hukum yang lebih berkompeten. Ketut Teneng berharap, pembahasan secara lebih spesifik mampu menghasilkan solusi yang lebih baik. Karo Humas kembali menyitir beberapa penjelasan Gubernur Mangku Pastika terkait dengan rencana reklamasi. Pihaknya berharap, semua

komponen menyikapi rencana ini dengan jernih dan pikiran terbuka. Menurutnya, rencana ini berangkat dari pemikiran antisipasi jauh ke depan dan sama sekali tak identik dengan menjual Bali. “Apanya yang dijual, justru kalau rencana ini bisa terealisasi, kita nambah luas wilayah,” tandasnya. Ketut Teneng lantas mengurai sejumlah manfaat positif dari rencana reklamasi ini. Selain berfungsi sebagai daratan penyangga terkait mitigasi bencana tsunami, reklamasi juga menjadi salah satu solusi dari kecenderungan makin meningkatnya alih fungsi lahan produktif. Lebih dari itu, Bali juga akan menambah luas hutan jika rencana ini terwujud. Sebagaimana pernyataannya:

Dari 800 hektar, 50 persen lahan hasil reklamasi akan di hijaukan. Artinya kita akan nambah hutan. Sektor ketenagakerjaan dan pengembangan destinasi pariwisata juga menjadi pertimbangan dari bergulirnya rencana reklamasi Teluk Benoa ini. Ada ribuan lulusan universitas dan sekolah kejuruan yang setiap tahunnya siap terjun ke dunia kerja. Jika tidak diantisipasi dengan upaya penambahan lapangan kerja baru, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kita akan bawa kemana anak-anak itu. Di samping itu, pariwisata Bali juga perlu alternatif destinasi baru untuk menarik kunjungan wisatawan. Negara lain berlomba-lomba menambah destinasi baru. Jika kita statis, kita akan ketinggalan.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada lembaga berwenang. Dalam kesempatan itu dia juga kembali menegaskan bahwa SK yang dikeluarkan Gubernur belumlah ijin untuk melakukan kegiatan reklamasi. SK itu masih banyak batasan-batasan dan dibuat agar pihak investor bisa mulai bergerak melengkapi prasyarat yang dibutuhkan. Merujuk pada sejumlah pemikiran tersebut, Ketut Teneng berharap agar rencana ini disikapi secara lebih jernih serta tidak selalu didasari atas prasangka negatif. Mengenai kajian teknis dalam klausul keempat SK tersebut, PT.Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) selaku pemegang ijin diwajibkan mengikuti dan mentaati prosedur perundangan yang berlaku, melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan daratan penyangga dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan Teluk Benoa. Selain itu, PT. TWBI juga wajib menyusun AMDAL, mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat di tempat usahanya serta merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa/> diakses pada: Sabtu, 20 Januari).

Apa yang disampaikan pemerintah bali terkait reklamasi tersebut sesungguhnya ingin menegaskan bahwa konsep keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan benar-benar dijaga. Kajian dari perspektif hukum, lingkungan atau AMDAL adalah bukti bahwa

pemerintah provinsi Bali berkomitmen untuk menjadikan falsafah Tri Hita Karana sebagai ujung pembangunan Provinsi Bali. Semua kajian itu setidaknya akan memunculkan jawaban seberapa jauh dampak pembangunan reklamasi terhadap nilai nilai keyakinan masyarakat Bali. Lebih jauh adalah memberikan jawaban terhadap dampak nyata atas konsekuensi dilakukannya reklamasi di Teluk Benoa. Tentu pemerintah Provinsi Bali juga berkaca pada reklamasi Jakarta maupun pulau Serangan yang telah dilakukan. Hubungan manusia terlihat menjadi tidak harmonis karena kegagalan kebijakan yang meniadakan aspek harmoni dan keseimbangan alam, manusia dan Tuhan. Lebih jauh diamati bahwa pemerintah Bali selalu mendengarkan aspirasi masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan reklamasi. Bali yang aman, nyaman dan damai akan menciptakan tatakelola masyarakat yang beradap. Diharapkan hal tersebut mampu mendongkrak pemasukan di sektor riil yang selama ini diharapkan oleh pemerintah.

Gb 6: Kegagalan reklamasi Jakarta karena amdal tidak matang



Penulis juga berpendapat bahwa posisi pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai pelaksana dari Keputusan Presiden No 51 Tahun 2014 yang sudah disahkan. Perlu diupayakan dengan konsep Tri Hita Karana agar masyarakat Bali dengan pemerintah tidak berujung pada tindakan saling melawan yang menimbulkan perpecahan. Bali yang aman bertahun lamanya adalah hadiah dari keyakinan menjalankan nilai Tri Hita Karana secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat Bali. Secara lebih lanjut implementasi dari nilai ini dapat dilihat dari program kerja lima tahunan yang dilakukan oleh I Made

Mangku Pastika selama menjabat hingga periode kedua yang berarti Bali Mandara dalam konteks pembangunan provinsi Bali yang berkelanjutan.

C. Provinsi Bali dalam Konsep Pembangunan Bali Mandara

Pulau Bali merupakan salah satu primadona tujuan wisata dunia. Sebagai tempat tujuan wisata dan terpadu, Bali memiliki banyak tempat wisata menarik antara lain, Pantai Kuta, Nusa Dua, Uluwatu, Jimbaran, Pura Tanah Lot, Danau Beratan, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Nusa Penida, Pura Besakih, Ubud, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan masih banyak yang lainnya. Kini, Bali juga memiliki beberapa pusat wisata yang sarat edukasi untuk anak-anak seperti kebun binatang, Museum Tiga Dimensi, Miniatur Indonesia, dan berbagai arena jenis baru seperti SPA dan Pusat Belanja dengan konsep modern. Bali memberi nuansa yang berbeda. Nuansa keindahan, romantisme, kegembiraan, kebebasan, etnis, magis, ini tentu memberi makna bahwa Bali memang tempat yang lengkap dengan berbagai kisah dan ceritanya (Putra, 2017). Begitu besar potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Bali.

Selain memiliki banyak pariwisata yang berbasis keindahan alam, Bali juga merupakan cerminan kehidupan adat istiadat serta warisan budaya yang kuat. Hal inilah yang membuat pembangunan Provinsi Bali harus mengedepankan aspek budaya, agama, estetika serta keindahan alam yang harus dijaga. Provinsi Bali memiliki julukan lain yaitu Pulau Dewata. Hal ini menandakan bahwa Bali merupakan tempat tujuan wisata yang indah. Begitu banyaknya potensi daerah ini kemudian memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat program pembangunan Bali yang berkesinambungan namun tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian alam, kebudayaan, maupun rohani agama.

Semenjak kepemimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, konsep pembangunan Provinsi kemudian dituangkan dalam satu tema besar yaitu Bali Mandara. Bali berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan wisata dengan baik, aman namun tidak meninggalkan unsur agama, budaya, adat maupun menjaga harmoni keseimbangan antara alam, Tuhan dan manusia. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah pembangunan Bali tidak boleh tercerabut dari nilai aslinya. Gagasan Bali Mandara inilah sebagai inspirasi pembangunan Bali yang berkelanjutan. Kelak di kemudian hari akan menjadi warisan yang berharga bagi generasi berikutnya. Secara turun temurun pembangunan Bali akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun peradaban di daerahnya.

Gb 7: Jalan Tol Bali Mandara menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua.



Bali Mandara adalah program yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Bali, yaitu Made Mangku Pastika. Mandara sendiri merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera yang juga bentuk perwujudan dari cita-cita Provinsi Bali. Hal ini tertuang dalam satu karya buku yang berjudul “Bali Mandara”. Gubernur Bali Made Mangku Pastika, sejak Agustus 2008, merumuskan konsep pembangunan Bali berlandaskan visi Bali Mandara. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah provinsi Bali nomer 9 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Bali (RP JDM) 2008-2013 sebagai Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera (Putra, 2017).

Tiga konsep tersebut yaitu Bali yang Aman, Damai, Sejahtera dimaknai sebagai berikut: Bali maju adalah Bali yang dinamis, yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keikhlasan demi tegaknya dharma, tetap “metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dengan nilai-nilai agama hindu (Bali) serta adat istiadat bali. Kemoderenan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka (Putra, 2017).

Pada hakekatnya Bali Mandara dalam kaidah maju sebagaimana dituangkan dalam pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang tidak boleh meninggalkan akar budaya dan religi. Selama ini Bali menjadi tujuan wisata dunia karena wisatawan asing maupun dalam negeri melihat adanya warisan budaya yang dijaga secara turun temurun oleh generasi keturunan Bali. Di sisi lain meskipun pembangunan Bali begitu pesat namun akar kebudayaan maupun religi tidak tercerabut dari nilai aslinya. Upacara suci, adat, maupun berbagai prosesi kebudayaan tetap bisa hadir di tengah akulturasi budaya yang begitu kuat. Kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang senantiasa menjaga keseimbangan antara hubungan sesama manusia, manusia dengan tuhan atau pencipta alam semesta maupun hubungan manusia dengan alam.

Konsep kedua adalah Bali Aman, Bali aman adalah Bali yang “dabdab” teratur sekala niskala, memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan antar manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam lingkungannya, serta manusia dengan Tuhannya, sejalan dengan konsep “Tri Hita Karana”. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkisme dan virus non tradisional lainnya yang mewarnai jaman kali ini (Putra, 2017).

Kekuatan keamanan Bali terletak pada harmonisasi dan ideologi kultural yang sangat melekat di hati masyarakat Bali. Menjaga keseimbangan antara manusia, alam dengan penciptanya tidak boleh ditinggalkan. Jika manusia takut dengan tuhannya niscaya ia tak akan berani melakukan tindakan kriminal, ia menghormati hak-hak sesamanya, menghormati sesama manusia, ia pandai dalam menjaga kelestarian alamnya. Keamanan provinsi Bali bergantung pada penduduknya, jika masyarakat sadar untuk senantiasa hidup berdampingan bersama dan merasa memiliki ikatan persaudaraan yang kuat maka dengan sendirinya alam akan terjaga dan terpelihara. Tentu masyarakat Bali sadar bahwa globalisasi sudah sangat begitu kuat baik dari sisi perkembangannya maupun pengaruhnya. Sehingga ideologi kebudayaan masyarakat Bali harus selalu dijaga dan diperkuat dengan pengamalan nilai keseimbangan sebagaimana tercermin dalam agama Hindu.

Masyarakat Bali tetap berbusana adat, memakai “Udeng” dan pernak pernik lainnya dalam menyambut adanya akulturasi budaya dalam globalisasi yang tiada bersekat. Pengalaman sejarah pernah terjadi musibah besar yaitu Bom Bali yang menjadi pukulan telak untuk seluruh elemen provinsi bali. Belajar dari kejadian itulah kekuatan ikatan masyarakat Bali harus diperkuat agar kejadian memilukan tidak terjadi lagi. Prioritas

keamanan menjadi sangat penting, selain aparat negara menjaga menjaga Bali, masyarakat Bali harus senantiasa terlibat dalam mewujudkan Bali aman melalui upaya berkumpul bersama atau yang dikenal “Simekrame”(simakrama) . Setiap persoalan di Bali dibahas di satu wadah dialog bersama guna mencari solusi paling baik yang mampu merepresentasikan nilai luhur kehidupan Provinsi Bali. Hal ini diharapkan memberi pengaruh besar terhadap suasana aman dan nyaman bagi siapapun yang akan berkunjung ke Bali.

Nilai ketiga dalam konsep pembangunan Bali Mandara adalah Bali damai yaitu Bali yang diselubungi atmosfer kesenangan lahir batin serta selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Bali damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun di pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “*briyang-briyung, pakede pakenyem*”. Hal tersebut merupakan indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan (Putra, 2017). Potensi ekonomi Bali paling besar ditopang oleh pariwisata, oleh karena itu faktor keamanan maupun kedamaian harus senantiasa dijaga agar keberlangsungan perputaran roda perekonomian tetap terjaga. Dalam konteks perbedaan harus diselesaikan dengan prinsip tersebut. Tidak ada demo yang ricuh, maupun aksi masa yang kontra produktif dengan nilai luhur yang diyakini masyarakat Bali. Tentu wisatawan manca Negara maupun domestik akan memperhatikan hal tersebut. Mereka hanya akan datang di wilayah yang aman dan tercipta rasa kedamaian.

Nilai keempat adalah Bali sejahtera yaitu Bali yang *sukerta sekala niskala*, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian. Kesejahteraan adalah hasil akhir capaian yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam konsep pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Garis besar inilah yang kemudian secara menyeluruh diimplementasikan dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Bali semenjak era Gubernur I Made Mangku Pastika.

Adapun visi dan Misi Bali Mandara sebagaimana konsep pembangunan Bali Mandara adalah sebagai berikut: Berdasarkan visi Bali Mandara, pemerintah provinsi Bali menempatkan penanganan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan. Kemiskinan merupakan muara dari beberapa permasalahan, terutama pendidikan dan kesehatan. Seluruh permasalahan yang ada harus ditangani secara simultan, tidak bisa sektoral dan terpisah. Prioritas penanganan tersebut kemudian dituangkan dalam APBD provinsi Bali setiap tahunnya, sebagai landasan penjabaran dan pembiayaan (Putra, 2017).

Beberapa program prioritas sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, antara lain: jaminan kesehatan Bali mandara, sistem pertanian terintegrasi, bedah rumah, penuntasan buta aksara dan pembangunan bidang pendidikan, *Bali Green Province* serta gerakan pembangunan desa terpadu (Putra, 2017). Salah satu implementasi program Bali Mandara adalah pembangunan Tol Bali Mandara. Pada awal sejarahnya mengapa jalan tol Bali Mandara dibangun di atas laut? Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan dengan budaya yang ada di Bali. Rencananya, jalan tol ini akan dibangun dengan konsep melayang atau bisa disebut dengan jalan layang. Akan tetapi, ada aturan khusus terkait budaya di Bali, bahwa dalam mendirikan bangunan tidak boleh memiliki ketinggian di atas pura yang ada di sekitarnya. Sehingga, investor tidak mendapatkan izin atas pembangunan. Kemudian, salah satu dari pihak Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Sumaryanto memunculkan ide untuk membuat jalan tol di atas laut. Pembangunan jalan tol ini melibatkan beberapa pihak pemegang saham, yaitu PT. Jasa Marga, PT. Pelindo III, PT. Angkasa Pura I, PT. Wijaya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Utama Karya, PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Tak hanya itu, pembangunan juga melibatkan pemda serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Jika berbicara soal nama Bali Mandara, pada awalnya nama yang digunakan bukan Bali Mandara, akan tetapi tol atas laut Bali. Bahkan ada yang menyebutnya dengan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Pada akhirnya, Gubernur Provinsi Bali mengusulkan dua nama, yaitu Soekarno Hatta dan Bali Mandara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya yang disetujui adalah Bali Mandara.

Jalan tol Bali Mandara yang memiliki panjang 12,7 km di atas laut ini merupakan pertama kali dan satu-satunya jalan tol yang memiliki jalur khusus bagi pengendara sepeda motor yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Dalam pembangunannya, Bali Mandara ini sama sekali tidak mengambil dana dari APBD (Putra, 2017). Dana yang digunakan berasal dari gabungan antara bank BUMN dan PT. Jasa Marga. Selain itu, material serta teknologi yang digunakan dalam pembangunan ini berasal dari dalam negeri atau bisa dikatakan merupakan karya anak bangsa. Jalan tol ini dibuat sekitar 15 bulan, yaitu dari bulan Maret 2012 hingga sekitar bulan Mei 2013. Untuk sistem keamanan yang berkaitan dengan cuaca diatas laut, dipasang adanya CCTV dan alat pemantau angin di setiap gerbang tol. Aturan yang berlaku, yaitu ketika kecepatan angin mencapai 40 km atau diatasnya, maka jalan tol akan ditutup untuk menghindari kecelakaan. CCTV yang dipasang 24 jam ini berguna

untuk memantau kendaraan yang melaju. Jadi misalnya ada kendaraan yang mogok, maka dari PT. Jasa Marga dapat menolong dengan menyediakan alat derek secara gratis.

Tak hanya dalam bentuk jalan tol, pembangunan Bali Mandara juga dilengkapi oleh pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM). RSBM adalah rumah sakit yang mengutamakan pelayanan prima yang ditunjang oleh tenaga medis yang profesional serta alat-alat kesehatan yang canggih dan memadai demi kesejahteraan, kesehatan masyarakat Bali. Pentingnya kesehatan bagi kehidupan masyarakat, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani bertujuan untuk memperoleh pikiran yang sehat, perilaku yang baik serta kesejahteraan masyarakat Bali (Putra, 2017). Rumah sakit ini didirikan pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2017. Rumah sakit ini memberikan pelayanan 24 jam. Pada saat diresmikan, Gubernur Provinsi Bali mendatangi rumah sakit dan melakukan persembahyangan di Pura Tambak Sari Rumah Sakit Bali Mandara. Bersamaan dengan itu, sekretaris daerah setempat juga datang, kemudian mencoba alat-alat kesehatan yang ada. Kemudian, gubernur dan wakil gubernur juga langsung mencoba pemeriksaan jantung.

Rumah sakit Bali Mandara memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit yang mandiri dengan pelayanan berkualitas menuju rumah sakit berkelas dunia tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan RSBM sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan; menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja; mengembangkan layanan inovasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki berorientasi pada kebutuhan masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas; menjadikan RSBM bersertifikat akreditasi nasional dan internasional. Dari visi dan misi yang dibuat oleh RSBM dapat diketahui bahwa rumah sakit ini sangat mengedepankan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan dengan ditunjang adanya SDM yang mumpuni. Rumah sakit ini sempat menuai keresahan di masyarakat sehingga terjadi demo di lingkungan rumah sakit pada saat diresmikan. Rumah sakit ini sempat menuai protes di masyarakat perihal pengingkaran janji terkait rekrutmen pegawai. Sebelumnya investor menjanjikan lapangan pekerjaan dengan masyarakat Sanur. Namun pada kenyatannya, dari 500 pegawai hanya 7 pegawai saja yang diterima dari masyarakat setempat. Seharusnya ada jumlah minimal

pekerja sebanyak 40 persen yang berasal dari masyarakat Sanur dapat bekerja di RSBM, tetapi mereka hanya meminta 10 persennya saja sesuai kesepakatan awal. Pada kenyataannya pihak RSBM mengingkari dan sebanyak 19 ribu lebih masyarakat Sanur melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut.

Gb 8: Rumah Sakit Bali Mandara



Pembangunan Bali Mandara juga terus berlanjut. Adapun selanjutnya akan dibahas terkait SMK dan SMA Negeri Bali Mandara. SMK Bali Mandara didirikan pada 2 Desember 2013 dan resmi digunakan pada Juli 2015. SMK ini memiliki tiga jurusan yaitu teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan, teknik gambar bangunan. Fasilitas yang disediakan yaitu asrama dan juga dari pemerintah menyediakan bantuan Pendidikan untuk siswa Bali yang memiliki potensi untuk maju serta berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu juga untuk menunjang bidang non-akademik, sekolah ini memiliki beberapa kegiatan yang dapat diikuti oleh siswa, yaitu program keagamaan dan ekstrakurikuler. Kriteria kewajiban dari masing-masing kegiatan juga dibagi oleh sekolah. Kegiatan yang berada di wajib tingkat 1 yaitu pramuka; menyusul wajib tingkat 2 yaitu Karya Ilmiah Remaja (KIR), *marchingband*, dan tabuh; kemudian wajib tingkat 3 yaitu berbagai macam olahraga pilihan, seperti bela diri, sepak bola, basket, bola volly dan ekstrakurikuler lain seperti tari (yang tentunya tari Bali) dan *nyurat lontar*. Ada pula kegiatan lain terkait pelatihan kepemimpinan, seperti OSIS, seminar dengan program *pathway to leaderpreneurship* (PTL), *enterprenuership club*, dan sebagainya.

Sistem yang digunakan di sekolah ini adalah dengan menerapkan kurikulum 2016 dilengkapi dengan kompetensi dalam muatan kurikulum Politeknik Negeri Bali yang dalam pembelajaran diampu langsung oleh Dosen Politeknik Negeri Bali. Terkait dengan bidang akademiknya sendiri, ada program *moving class*, *silent reading*, *morning speech*, *additional evening class*, dan sebagainya. Tak kalah dengan SMK Bali Mandara, SMA Bali Mandara yang biasa disingkat dengan SMANBARA merupakan sekolah bertaraf internasional yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekolah ini merupakan sekolah yang menerima siswa dari kalangan tingkat ekonomi orang tua yang kurang mampu. Sekolah yang memiliki visi yaitu menjadikan SMANBARA sebagai sekolah terbaik di Bali dalam mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Sedangkan misinya yaitu mendidik calon pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik, berwawasan global dan tanggung jawab dengan nilai-nilai integritas; menjadi terbaik, saling menghargai dan menghormati, berempati, berinovasi, berani, transparan dan terbuka; cinta tanah air, inklusif dan setia kawan.

Gb 9: Siswa-siswi SMA dan SM Bali Mandara



Dari visi dan misi yang dibuat, dapat terlihat bahwa SMANBARA ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, bukan hanya dalam bidang akademik saja. Sekolah ini berdiri pada tahun 2011 serta merupakan perwujudan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Bali dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Seringkali ketika menyebut SMA Negeri Bali Mandara terdapat kata yang

mengiringinya, yaitu Sampoerna Academy. Sekolah ini menyediakan asrama bagi siswanya serta memiliki kurikulum perpaduan antara kurikulum standar nasional dan standar internasional yakni kurikulum Internasional General Certificate of Secondary Education (IGCSE) yang berasal dari Universitas Cambridge dan Standar Nasional Pendidikan diterapkan secara bersama pada Sampoerna Academy. Sekolah ini membentuk program L to L (*learning to live*) guna membentuk siswa yang jujur, memiliki jiwa sosial, dan bertanggung jawab. Tidak hanya bidang akademik saja, akan tetapi terdapat program ekstra kulikuler, seperti kegiatan olahraga, kegiatan pelestarian lingkungan, klub jurnalistik, klub musik, dan sebagainya.

Bali Mandara merupakan salah satu wujud program untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Provinsi Bali. Pelayanan yang diberikan dari Bali Mandara pun sangat bagus, bisa dilihat dari adanya berbagai penghargaan yang diberikan. Selain lengkap, pelayanan yang diberikan juga ramah dan bisa dikatakan murah. Pelayanan publik tersebut diwujudkan guna menerapkan konsep *good governance* di Provinsi Bali karena adanya penerapan sistem transparansi. Akan tetapi, dalam pembangunan terkait, masih belum berpatokan terhadap pembangunan keberlanjutan, dimana pembangunan ini digunakan untuk masa kini dan juga memikirkan dampak masa yang akan datang. Jika dilihat, masih terdapat adanya kerusakan lingkungan dalam pembangunan Bali Mandara. Hal ini dapat berdampak terhadap rusaknya ekosistem Bali di masa yang akan datang.

Reklamasi menjadi tema besar yang kemudian lahir bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014. Babak baru tentang pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang di Provinsi Bali di sahkan oleh pemerintah pusat. Menimbang (a) Bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Giyanyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan revitalisasi. Pada huruf (b) bahwa kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan prasarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa. Huruf (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Giyanyar dan Tabanan, (Peraturan Presiden NO 51 Tahun 2014 Tentang Reklamasi).

Jika dicermati secara mendalam ada beberapa faktor yang mendasari lahirnya Keputusan Presiden tersebut. Dengan kondisi geografi Provinsi Bali disertai dengan pertumbuhan sosial yang sangat cepat tentu membutuhkan solusi agar mampu menjawab tantangan tersebut. Jumlah penduduk yang kian hari kian bertumbuh pesat tentu harus disertai dengan ketersediaan lapangan kerja, hunian yang layak serta tata kelola lingkungan yang baik. Pembangunan, pengelolaan serta tata ruang yang baik diharapkan menjadi solusi atas persoalan sosial yang mungkin akan dihadapi masyarakat Bali di kemudian hari. *Human development indeks* atau yang dikenal dengan indeks pertumbuhan manusia setidaknya akan tercapai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan tata kelola lingkungan yang baik.

Pulau Bali merupakan salah satu primadona tujuan wisata dunia dengan devisa sangat besar yang mampu menggerakkan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah dalam perspektif Peraturan Presiden ini akan menjaga kelestarian adat yang selaras dengan pertumbuhan demografi maupun psikografi wilayah Provinsi Bali. Sebagai wisata eksotis dunia inilah pemerintah pusat perlu mengoptimalkan sumberdaya wisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi, sosial budaya serta pariwisata.

Mengingat potensi pariwisata pulau Bali yang begitu digemari wisatawan dari segi budayanya, tradisinya, maupun keindahan alamnya membuat pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Peraturan ini dengan mudah diterima masyarakat karena mereka menganggap dengan adanya Perpres ini dapat membantu mengontrol investor untuk tidak mengambil lahan hijau yang ada di Bali ataupun mengambil lahan untuk hutan lindung. Selain menjadi kontrol pembangunan, peraturan tersebut juga menjadi kontrol sosial bagi kawasan konservasi.

Namun, pada akhir jabatannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah isi dari Peraturan Presiden Tahun 45 yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Adanya perubahan pada Perpres Nomor 45 membuat presiden menerbitkan peraturan presiden baru yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, dalam perpres ini menyatakan bahwa Telok Benoa tidak lagi menjadi kawasan konservasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres Nomor 45 Tahun 2011 serta mengurangi luas kawasan perairan Pulau Serangan dan Pulau Pudut.

Dengan adanya peraturan presiden tersebut membuat masyarakat Bali sedang dihadapkan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yang terletak di wilayah Kuta Selatan. Adanya rencana reklamasi ini tertuang jelas dalam Pasal 63A ayat (2) Perpres Nomor 51 tahun 2014 yang intinya mengubah kawasan konservasi perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga dengan luas wilayah reklamasi maksimal seluas 700ha.

Jika dilihat dari pengertiannya, reklamasi memiliki beberapa arti. Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Definisi ini sekalipun hanya menyebutkan reklamasi saja, tetapi dimaksudkan sebagai definisi untuk reklamasi pesisir. Adanya proyek reklamasi ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Adapun pihak yang mendukung adanya reklamasi berargumen bahwa pulau yang akan direklamasi kondisinya sudah tidak bagus karena perubahan iklim global, tujuan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa sendiri untuk mengurangi dampak bencana alam, iklim bencana global dan juga menangani kerusakan pantai pesisir. Selain itu Teluk Benoa juga dapat dijadikan ikon pariwisata baru dengan pengembangan *green development* sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya untuk bencana tsunami.

Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali Ketut Teneng yang menyatakan bahwa semua komponen berhak mengutarakan pendapat tentang rencana reklamasi Teluk Benoa yang belakangan mengundang pro dan kontra. Namun sejatinya, rencana ini merupakan sebuah antisipasi jauh ke depan dan mungkin baru dinikmati 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Tingginya alih fungsi lahan produktif sejalan dengan berkembangnya pembangunan di Pulau Dewata menjadi salah satu hal yang mendasari bergulirnya rencana ini. Penambahan lahan baru melalui reklamasi diharapkan dapat menjadi satu alternatif alih fungsi lahan. Secara alami pesatnya laju pembangunan belakangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan. Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, dalam kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1997-2011, lahan produktif berkurang mencapai 436 hektare atau 0,50 persen tiap tahunnya. Pada tahun 1997, lahan produktif Bali tercatat 87.849 hektare dan pada tahun 2011 tercatat 81.744 hektare. Melihat pesatnya pembangunan dalam dua tahun terakhir, data tersebut kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang. Melihat kecenderungan tersebut, Bali yang secara geografis sangat sempit, terus mengalami pengurangan lahan pertanian karena

alih fungsi baik untuk pemukiman maupun sarana pariwisata. Berangkat dari fakta tersebut, Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam menjaga perkembangan pembangunan pariwisata agar sejalan dengan kelestarian pertanian sebagai nafas kebudayaan Bali. Menurut Teneng bahwa reklamasi bisa menjadi satu alternatif untuk mencegah makin menyusutnya lahan produktif. Namun demikian, proses reklamasi ini masih sangat panjang dan memerlukan pemikiran bersama untuk mewujudkannya, sehingga nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali di masa mendatang. Ketut Teneng berharap, semua pihak bisa menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan jauh ke depan. (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/> diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Pihak yang tidak mendukung adanya reklamasi, mengungkapkan bahwa kawasan konservasi memiliki banyak fungsi vital dalam pelestarian ekosistem bawah laut. Mereklamasi kawasan konservasi sama saja dengan mendukung adanya dampak negatif bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian, mereka juga berpendapat bahwa reklamasi yang berkedok revitalisasi ini sebuah kebohongan publik yang hanya berkepentingan pada para modal saja. Negara membangun akses-akses yang dapat memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Bali dan kemudian konsekuensi dari keberpihakan investor pada pemerintah mengakibatkan kerugian bagi publik karena nantinya investor akan mematikan mata pencaharian masyarakat yang bekerja di kawasan Teluk Benoa.

Kekhawatiran bahwa pemilik modal akan menindas kepentingan publik menjadi sikap yang ditunjukkan oleh ForBALI yang sangat tidak mendukung adanya reklamasi berkedok revitalisasi. ForBALI melihat berubahnya status konservasi menjadi daerah pemanfaatan publik merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung investor untuk mengeksploitasi Pulau Bali demi keuntungan segelintir orang. Hal tersebut secara otomatis menindas masyarakat Bali di tanah kelahiran mereka sendiri.

Di sisi lain, Yayasan Bumi Bali Bagus justru mendukung adanya reklamasi bahkan menurut mereka reklamasi Teluk Benoa sangat diperlukan mengingat keadaan Teluk Benoa yang sudah kritis. Pendangkalan yang terjadi di Teluk Benoa sendiri akan membahayakan ekosistem *mangrove*. Yayasan Bumi Bali Bagus juga yakin, apabila Teluk Benoa di reklamasi maka akan mengembalikan fungsi *mangrove* dan juga dapat mengurangi potensi banjir di kawasan pesisir Teluk Benoa.

Adanya perubahan Peraturan Presiden yang dibuat pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak menimbulkan pro dan kontra. Perubahan tersebut bisa dikatakan sangat terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik tanpa memperhatikan dampak yang ada setelah peraturan presiden ini muncul. Selain itu, peraturan presiden tersebut juga bertentangan dengan berbagai undang-undang. Diantaranya, Undang-undang No.1 Tahun 2014, Undang-undang No.16 Tahun 2009 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.26 Tahun 2013. Dimana dalam undang-undang tersebut sudah jelas disebutkan bahwa Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029, kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang dapat digunakan untuk melaksanakan upacara adat umat Hindu di Bali yang memang tidak boleh dibangun atau digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau kegiatan reklamasi.

Gb 10: Posisi Teluk Benoa Bali



Gb 11: Pulau Pudut



Gb 12: Teluk Benoa dalam pro dan kontra



Gb 13: perencanaan proyek dalam reklamasi Teluk Benoa



BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BALI

DALAM MENGATASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

A. Reklamasi dalam perspektif pemprov Bali dan Masyarakat Bali

Reklamasi atau proses pembuatan lahan baru untuk memperbaiki suatu kawasan, semakin terdengar akrab di telinga masyarakat Indonesia. Selain karena Indonesia memiliki banyak proyek reklamasi yang sedang berjalan, banyak pro kontra reklamasi juga terjadi di

negara Indonesia. Dengan kata lain bahwa reklamasi di Indonesia berjalan tidak sesuai harapan sebagaimana reklamasi di luar negeri. Dampak positif negatif reklamasi ini masih menjadi perdebatan hangat beberapa pihak terkait, khususnya pemerintah dengan masyarakat setempat. Perdebatan berkisar pada dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Sebelum membahas tentang pro kontra reklamasi Bali, akan dilihat beberapa negara yang sukses melakukan reklamasi tanpa pertentangan dari masyarakat, antara lain terdiri dari 8 negara sebagaimana di bawah ini:

1. Reklamasi Dubai: Palm Jumeirah.

Kota yang paling berani mengadakan proses reklamasi adalah Dubai, Uni Emirat Arab. Reklamasi Dubai yang pertama adalah Palm Jumeirah. Pulau buatan berbentuk pohon Palm ini memiliki luas 572.1 ha. Lahan yang dibuat terpisah dari pesisir, dengan bentuk yang dibuat cantik. Adapun motif pembangunan reklamasi adalah kesadaran dari pemerintah Dubai bahwa lambat laun tambang minyaknya akan mengering, sehingga perspektif bisnis dialihkan menjadi bisnis pariwisata dunia. Dubai menyadari juga bahwa wilayahnya tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka dari itu ia berani melakukan reklamasi daratan untuk menarik turis asing. Pulau ini menjadi pusat hiburan kelas atas dengan fasilitas yang eksklusif. Setelah Pam Jumeirah, proyek reklamasi Dubai yang masih dalam penggarapan adalah Palm Jebel Ali, Palm Deira, dan The World.

Reklamasi Dubai ini dilaksanakan oleh perusahaan pengembang nasional Dubai, Nakheel Properties. Kegiatan pengurukan dilakukan Perusahaan Belanda bernama *Van Oord Dredging*, salah satu ahli reklamasi di dunia. Adapun pembelajaran Reklamasi Dubai: Pada saat konstruksi terjadi stagnasi pada air di dalam *breakwater*, yaitu arus pasang surut tidak dapat mencapai seluruh bagian *crescent* (bagian melengkung pada *breakwater*). Hal ini menyebabkan genangan yang menimbulkan beberapa masalah seperti tumbuhnya *algae*, menjadi area pertumbuhan nyamuk, terjadi sedimentasi yang mengganggu bentuk dari pulau-pulau tersebut. Solusinya, dibuat celah pada *breakwater* tersebut. Dilansir dari National Geographic Channel, *breakwater* ini dimodifikasi dengan membuat celah pada sebuah sisi, sehingga pergerakan gelombang dapat memberi oksigen pada air. Dengan adanya celah ini mencegah tergenangnya beberapa pulau karena sedimentasi.

Gb 14: Reklamasi Dubai



2. Reklamasi Singapura.

Sebagai negara dengan wilayah kecil namun kekayaan yang melimpah bukanlah hal yang sulit ketika Singapura menetapkan sebuah proyek reklamasi pada pulau Sentosa. Proyek reklamasi dunia sangat terkenal. Pulau ini dulunya dikenal sebagai Pulau Blakang Mati yang kemudian digabungkan dengan pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau Sentosa seluas 500 hektar ini menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan seperti hotel, taman, villa, dan arena permainan. Beberapa tempat wisata terkenal yang terdapat di pulau ini adalah Madame Tussauds, Underwater World, Dolphin Lagoon, Animal & Bird Encounters, Sentosa Adventure Park, dan Universal Studio Singapura. Pembelajaran dari Reklamasi Singapura: Pulau sentosa merupakan salah satu resort yang berfokus pada tema *sustainable tourism*. Melalui website resmi sentosa.gov.sg dijelaskan 10 poin mengenai sustainability plain di Pulau Sentosa. Beberapa diantaranya adalah menjaga ekosistem alam kawasan pulau tersebut, mempromosikan perilaku ramah lingkungan kepada para pengunjung yang datang, efisien dalam menggunakan energi bahan bakar, serta melindungi aset heritage Singapura.

Gb 15 : Reklamasi Singapura



3. Reklamasi Mongolia.

Proyek reklamasi di Mongolia sebagai salah satu proyek reklamasi sukses di dunia, adalah pemanfaatan lahan tambang yang telah rusak, dengan nama proyek Peabody Energy Ereen Mining Site. Saat ini area bekas tambang di Ereen telah bertransformasi menjadi padang rumput yang memiliki banyak kegunaan bagi masyarakat lokal, terutama untuk kebutuhan penggembalaan ternak. Proyek reklamasi ini juga berhasil menyediakan sumber air minum bersih bagi masyarakat lokal yang sebelumnya memiliki kesulitan untuk mengakses air bersih. Pembelajaran dari Reklamasi Mongolia: Salah satu kunci sukses proyek reklamasi di Mongolia ini terletak pada pemilihan penanggung jawab proyek yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Selain itu, proyek reklamasi ini juga memperhatikan praktik budaya masyarakat sekitar dan melibatkan keterlibatan aktif para warga lokal dalam pengembangannya. Semua material konstruksi dibeli dari pengusaha lokal atau melalui kantor cabang beberapa pabrik material internasional yang terletak di Mongolia. Proyek ini juga menerapkan transfer pengetahuan mengenai proyek reklamasi terhadap tenaga kerja lokal.

Gb 16 : Reklamasi Mongolia



4. Reklamasi Belanda.

Reklamasi Belanda merupakan salah contoh reklamasi sukses dunia yang mendorong Indonesia untuk melakukan reklamasi serupa. Nama proyek tersebut adalah *Port of Rotterdam* yang disebut-sebut menjadi inspirasi “Port of Jakarta”. Port of Rotterdam memang merupakan salah satu proyek reklamasi sukses di dunia. Pelabuhan hasil reklamasi proyek Maasvlakte 1 telah mencapai kapasitas maksimum, maka dibuka proyek Maasvlakte 2 yang menghasilkan pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial sejak tahun 2013. Saat ini, Port of Rotterdam menjadi pelabuhan terbesar di benua Eropa dengan angka throughput per tahun sebesar 465 juta ton. Pembelajaran dari Reklamasi Belanda: Upaya reklamasi dilakukan oleh negara Belanda untuk berbagai tujuan besar, seperti untuk mencegah banjir berkepanjangan, yang mengganggu industri pertanian, hingga meningkatkan kondisi ekonomi negara. Saat ini, sistem reklamasi, hidrologi, dan drainase Belanda seringkali menjadi referensi bagi banyak proyek reklamasi pesisir dan danau di seluruh dunia.

Gb 17: Reklamasi Belanda



5. Reklamasi Hongkong.

Awalnya wilayah ini hanyalah pulau terpencil di Hongkong dan sepi penghuni. Lewat reklamasi di sebelah utara, timur dan timur laut Hongkong seluas 14 hektar, Tung Chung kini berubah wajah menjadi kota baru dengan magnet utamanya bandara internasional Hongkong dan wisata belanja. Area Tung Chung saat ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Hongkong. Citygate Outlets adalah magnet utama selain bandara internasional. Berada di jantung kota baru ini yang dihubungkan oleh MTR Tung Chung dan terminal bus, sehingga membuat Tung Chung menjadi mudah dikunjungi. Dikembangkan seluas 46,000 m², pusat belanja ini menawarkan berbagai, hiburan, gerai makanan yang tersebar di lima lantai. Pembelajaran dari Reklamasi Hongkong: Reklamasi yang dilakukan di Hongkong tidak hanya fokus tentang masalah perluasan lahan. Di dalamnya terdapat desain besar yang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan upaya perlindungan kekayaan alam Hongkong yang sebenarnya bersifat terbatas.

Gb 18 : Reklamasi Hongkong



6. Reklamasi China.

Reklamasi China sudah ada sejak dinasti Qing, ketika para petani di daerah tersebut membutuhkan lahan agrikultural. Cao Fei Dian adalah proyek reklamasi sukses dunia yang paling besar di China. Lebih dari 20 juta ton pasir menjadi lahan baru pelabuhan ini. Ukurannya sangat luas yakni 2000 hektar, atau seperti dua kali Kota Boston. Pelabuhan di Cao Fei Dian telah beroperasi namun pengembangan kawasan industri dan pemukiman eco-city di area ini belum berkembang secara maksimal. Hingga tahun 2014, hanya terdapat ribuan warga yang telah menempati pemukiman eco-city di Cao Fei Dian ini, masih jauh dari target 300.000 pemukim di tahun 2010 yang ditetapkan di awal pembangunan. Pembelajaran dari Reklamasi China: Reklamasi di Cao Fei Dian dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, sistematis, dan dengan tahapan pembangunan yang jelas. Teknik reklamasi sistem polder dinilai cukup sederhana dan efisien. Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan elemen-elemen pembentuk ruang yang dinilai memiliki signfikansi dan daya tarik yang tinggi, seperti kawasan pelabuhan dan fasilitasnya, jalan raya, jalur kereta api, hingga jaringan listrik. Pembangunan yang tidak maksimal di area ini dikarenakan penghentian pinjaman dari bank dan penundaan pembangunan beberapa proyek di tengah jalan dikarenakan peningkatan harga bahan material dan rendahnya dukungan dari pemerintah. Proyek reklamasi selanjutnya harus turut mengkaji

seluruh faktor yang dapat membuat sebuah proyek reklamasi menjadi sustainable dan tidak berhenti di tengah pembângunan.

Gb 19: Reklamasi China



7. Reklamasi Korea Selatan.

Proyek reklamasi sukses di Korea Selatan adalah Song Do International Business District. Luas kota ini kurang lebih 600 hektar. Beberapa landmark terkenal di area ini adalah Songdo Central Park dan Convensia. Song Do International Business District juga telah menjadi tuan rumah bagi beberapa acara berskala internasional seperti Asian Games 2014 dan The World Education Forum 2015. Area Song Do International Business District sendiri mendapat perhatian besar dari masyarakat global setelah menjadi lokasi pembuatan video ‘Gangnam Style’ dan ‘Right Now’. Proyek ini berlangsung selama 10 tahun dan menghabiskan kurang lebih 40 Miliar Dollar AS. Angka yang sangat besar ini sesuai dengan hasil “new smart city” Song Do. Pembelajaran dari Reklamasi Korea Selatan: Proyek reklamasi Song Do merupakan contoh proyek reklamasi dalam skala besar. Perencanaan proyek dilakukan secara matang, sistematis, dan informatif karena perencanaan pun ditampilkan dalam bentuk maket. Kajian dari berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, teknis, dan lingkungan, dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik berbagai kepentingan. Teknik reklamasi sistem polder dinilai cukup sederhana dan efisien. Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan elemen-elemen pembentuk ruang yang dinilai memiliki signfikansi dan daya tarik yang tinggi, seperti kawasan pelabuhan dan

fasilitasnya, jalan raya hingga jalur kereta api yang langsung menuju ke Bandara Internasional Incheon.

Gb 20: Reklamasi Korea Selatan



8. Reklamasi Jepang.

Proyek reklamasi sukses di dunia yang tak kalah populer adalah pembangunan Bandara Internasional Kansai. Reklamasi seluas kurang lebih 500 hektar ini, merupakan reklamasi daratan, yang dibuat lepas dari pesisir pantai. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi internasional di negara maju ini, Jepang membuat pulau buatan untuk membangun bandara internasional. Bandara Udara Internasional Kansai terletak di tengah Teluk Osaka. Konstruksi pulau dimulai tahun 1987, butuh waktu yang cukup lama untuk membentuk pulau yang anti gempa di Jepang. Konstruksi bandara dimulai tahun 1991 dan tahun 1994 bandara pun resmi dibuka. Bandara Kansai telah menjadi alternatif terhadap Bandara Narita bagi wisatawan internasional dari arah Greater Tokyo Area. Per Juni 2014, Bandara Kansai telah memfasilitasi 780 penerbangan per minggu ke seluruh Asia dan Australia, 59 penerbangan per minggu ke Eropa dan Timur Tengah serta 80 penerbangan per minggu ke Amerika Utara. Pembelajaran dari Reklamasi Jepang: Jepang berhasil melakukan revitalisasi Osaka dan menaikkan taraf perekonomian warga sekitarnya. Negara yang sukses melakukan proses reklamasi pantai menjadi lebih maju karena melakukan prosesnya dengan hati-hati. Palm Island di Dubai telah melakukan lebih dari 100 studi sebelum memulai proyek ini. Bandara Udara Internasional Kansai di Jepang pun mendapat penghargaan “Rekayasa Sipil Monumen dari Milenium” penghargaan oleh American Society of Civil Engineers. Proses reklamasi di Kansai mengundang aktif partisipasi warga sekitar

untuk mengutarakan pendapat mereka. Reklamasi di Kansai sendiri dilakukan untuk menghindarkan protes dari warga atas kebisingan suara pesawat udara, mengingat bandara ini memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi.

Gb 21 : Reklamasi Jepang



(<https://www.kaskus.co.id/thread/572230cc582b2e7a0d8b456d/8-proyek-reklamasi-sukses-di-dunia/akses> 30 Juni 2018)

Jika ditilik dari manfaat positif dari pembangunan teluk Benoa tidaklah kecil. Dengan mengaca pada kesuksesan reklamasi di delapan negara di dunia rupanya menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menirunya. Tentu saja hal ini terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan di masa depan, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh kabiro Humas dan protokol Pemprov Bali, Ida Bagus Surya dalam wawancara Mei 2018 di kantor pemprov Bali:

Baik seperti kita ketahui bahwa pada akhirnya kita juga mengetahui bahwa pembangunan Teluk Benoa di Bali pada akhirnya keluar perpres 51. Dan itu sudah mengidentifikasi bahwa seakan-seakan pemerintah juga pemerintah dewata, semisal seperti memberikan izin untuk itu, ada nuansa yang saya mungkin sedikit bercerita ke belakang antara kedua belah pihak di satu sisi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sempat memperkirakan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga dalam posisi generasi yang membutuhkan pekerjaan lumayan tinggi ke depannya itu salah satu ranah yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah mungkin untuk pengembangan lapangan pekerjaan salah satunya kebetulan posisinya di pembangunan Teluk Benoa karena itu akan memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Ditandaskan oleh Kabiro bahwa yang pemerintah tidak semata-mata berdiri di satu pihak. Keuntungan pembangunan reklamasi juga berdampak secara langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali. Slogan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah tentang “bekerja dan bekerja “ harus difasilitasi oleh pemprov sehingga tidak hanya berada di mulut saja, sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Ida Bagus Surya:

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat karena data yang saya juga tidak hafal betul sekilas dalam beberapa dekade ke depan akan sangat dibutuhkan generasi muda kita untuk bekerja karena kita juga tidak ingin slogan “Bekerja! Bekerja!” tapi kalau lapangan pekerjaan gak ada kan bingung juga kita, untuk itulah salah satu itu adalah bagian dari pembukaan lahan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini memang terkait dengan upaya pemprov Bali dalam pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas. Dengan demikian penyediaan lapangan pekerjaan adalah pendukung bagi program-program lainnya. Namun di satu sisi, ada karakter masyarakat lokal yang memiliki tiga keyakinan mendasar, antara lain adanya beberapa tempat yang mereka anggap suci:

pertama tempat suci yang terdiri tidak hanya pure, masjid, gereja, dan apapun itu tempat ibadah harus disucikan,

kedua, masyarakat Bali mensucikan gunung,

ketiga, laut juga suci.

Itulah yang mendasari salah satu kenapa ada pemikiran berbeda dari masyarakat seakan akan tidak mau menerima laut digoyahkan dengan upaya reklamasi ini. Ketiga ritual ini terkait dengan ritual keagamaan Hindhu yang selama ini menjadi keyakinan masyarakat Bali. Sebagaimana hal ini diungkapkan lagi oleh kabiro humas dan protokol:

Jadi ada beberapa tempat yang biasa mereka pakai untuk acara keagamaan. Jika reklamasi itu diijinkan mereka khawatir tidak bisa menggunakan lagi, kan selama ini ketika ada pembangunan apapun di Bali itu pantai di kapling oleh si pengembang sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual kan seperti itu.

Alasan keberatan lain juga diungkapkan Gendo, pemimpin Walhi bahwasannya reklamasi sangat tidak beralasan karena membawa dampak yang negatif sebagaimana yang dipaparkannya:

Pertama dari aspek hukumnya, Teluk Benoa ini kan kawasan konservasi dia berbarengan direncanakan ditetapkan sebagai kawasan konservasi plus waktu merencanakan pembangunan jalan tol, nah dalam rumusan kawasan konservasi oleh beberapa peraturan hukum dinyatakan jelas bahwa kawasan

konservasi terlarang untuk direklamasi untuk kepentingan privat. Tapi kemudian itu yang dilanggar oleh Gubernur dengan mengeluarkan ijin di tahun 2012 maka kemudian kita lawan karena ini terjadi ketidakadilan ruang, nah yang kedua adalah Teluk Benoa yang luasnya 1400 ini, 400 hektar adalah kawasan reservoi kawasan resapan air karena ada lima sungai besar yang masuk kesini. Lima sungai besar yang kalau dari gunung hujan muaranya kesini dan ini adalah penampungan air daratan juga banjir daratan, sehingga kalau diuruk sampai 50% dari luasan teluk menurut research dari konservasi internasional kalau di uruk 50% berarti 3 jam hujan di akan mengalami kenaikan 80 cm kalau 6 jam hujan berarti 1,6 m (CNN Indonesia,16 September 2016)

Gb 22 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa Bali

CNN (1 September 2016)



Gb 23 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa Bali

CNN (1 September 2016)



Sumber: <http://youtube.be/H1p9c9zimio/> insight with Desi Anwar- Polemik Reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Gendo sendiri juga mengaitkan bahwa alasan penolakannya adalah alasan ritual suci yang tidak boleh diganggu gugat, sebagaimana yang dikatakannya:

Akan terjadi banjir dan kemudian airnya 24 jam, kalau sekarang kan pasang surut, 4 jam pasang 8 jam surut airnya, tapi kalau 24 jam pasang maka tidak terjadi flushing, flushing-nya terganggu airnya juga tidak akan berkualitas dengan baik sehingga biota-biotanya akan terganggu terdampak buruk yang terakhir juga adalah kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan suci oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dan sudah ditetapkan berdasarkan paruman pandita atau rapatnya pendeta majelis tertingginya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci yang tidak boleh dilakukan upaya-upaya pengurukan karena Teluk itu mempunyai energi yang suci disini ada banyak pura ada daratan pasang surut yang diyakini sebagai umat Hindu disebut muntik yang diyakini sebagai area suci (wawancara Gendo dengan Desy Anwar dalam acara Insight di CNN Indonesia 16 September 2016)

Gb 24:Perlawanan Panjang Warga Bali Menolak Reklamasi Teluk Benoa

CNN Indonesia Rabu, 29 Agustus 2018



Gb 25: DPRD Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

ANTARA News, Jumat, 24 Agustus 2018



Pengentasan kemiskinan memang tujuan utama pemprov Bali dalam melihat sisi positif reklamasi sebagaimana dikatakan oleh I Mangku pastika, dalam wawancara di acara insight CNN Indonesia:

Mau tidak mau, kalau kita mau growth mau tidak mau, sekarang tadi, kontroversi paradoks tadi ya kalau kita tidak mau ada orang datang ya memang harus stop investasi Bali selesai segini saja thats' oke, bagi saya itupun terjadi tidak apa-apa tapi manusia Bali kan bertambah terus jumlahnya, setiap tahun ada 25 ribu S1 yang tamat di Bali ini dari 53 perguruan tinggi setiap tahun, mau kerja dimana orang itu.

Hal ini menyebabkan ada beberapa pihak yang memang belum bisa menerima reklamasi dilakukan. Namun di pihak lain pemprov menyadari juga kebutuhan generasi muda untuk lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hal ini rupanya berbenturan dengan keyakinan tentang tempat ritual sebagaimana disebut sebelumnya. Beberapa tempat sebenarnya sudah terbuka tetapi masih ada beberapa desa yang kuat mempertahankan keyakinan ini, sebagaimana diutarakan oleh humas pemprov Bali:

ada beberapa desa adat yang melakukan upacara ritual. Mereka menganggap tempat itu memang sakral sehingga tidak boleh disentuh. Terdapat dualisme pemikiran, di satu pihak pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan untuk pembangunan yang lebih maju dan membuka lapangan baru

tapi di pihak lain ada beberapa *policy* yang membutuhkan daerah itu untuk tidak boleh disentuh.

B. STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI DALAM KASUS TELUK BENOA

1. Mengadakan forum komunikasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti simakrama dan PB3AS

Dualisme pemikiran antara pemerintah dan masyarakat tersebut rupanya mendatangkan konflik nilai, sementara demo pun berkembang dari kalangan masyarakat kepada pemerintah Bali untuk sebagai cerminan ketidaksetujuan untuk pembangunan proyek reklamasi. Dalam menangani dualisme sebagai sumber konflik, maka ada strategi yang dilakukan oleh pemprov Bali dalam menyelesaikan persoalan agar dua pihak saling puas. Beberapa bentuk duduk bersama secara terbuka dengan mengundang elemen terkait dilakukan pemerintah Bali, sebagaimana hal ini kembali dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Ya untuk menengahi dari dua perbedaan pendapat tadi, pemerintah provinsi Bali sudah berusaha untuk melakukan komunikasi. Pada beberapa pertemuan yang dilakukan sempat terjadi beberapa bentrokan. Pemerintah provinsi Bali juga sudah mendengarkan langsung aspirasi mereka terhadap demo-demo yang masyarakat lakukan tapi di pihak lain pemerintah provinsi Bali telah menyiapkan sarana untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebenarnya ada dua persoalan yang dihimbau oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan berharap bisa segera dituntaskan. Penegasan tersebut disampaikannya pada Simakrama Gubernur Bali ke- 84 yang digelar di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jl. Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar, Sabtu 29 Oktober 2018. Berikut penuturan Gubernur terkait dengan permasalahan di atas:

dua persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali saat ini yaitu tentang kelanjutan reklamasi Teluk Benoa serta permasalahan angkutan umum berbasis online tengah menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat sebagai pemilik kewenangan. Pastika berharap pusat segera mengambil keputusan agar kedua persoalan ini tidak berlarut larut dan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Gb 26: Simakrama sebagai forum komunikasi pemprov Bali dan masyarakat



Himbauan Pastika bukannya tidak beralasan mengingat demonstrasi yang semakin marak dari dua peristiwa. Imbas selanjutnya tentu saja mengarah kepada munculnya konflik antar masyarakat adat di Bali serta citra Bali sebagai daerah wisata terbesar di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh gubernur:

maraknya aksi demonstrasi terkait dua permasalahan di atas hendaknya menjadi bahan pertimbangan Pusat untuk segera mengambil langkah karena dikhawatirkan akan berimbas pada citra pariwisata Bali. Bukan saya bermaksud menyalahkan, persoalan ini adalah persoalan mendasar yang menyangkut banyak hal sehingga saya meminta ketegasan dari Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan baik terkait reklamasi Teluk Benoa maupun angkutan online, saya tidak mau ada konflik apapun di Bali dan membuat kita sesama saudara Bali bertengkar karena hal ini akan berpengaruh besar pada pariwisata kita.

Pastika berharap demonstrasi tidak usah dibesar-besarkan tetapi lebih baik dimusyawarahkan secara baik-baik tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kepala dingin, sebagaimana yang dikatakannya:

Kepada masyarakat baik yang pro maupun kontra agar menyampaikan aspirasi dengan baik, dipikirkan dengan kepala dingin dan tidak menggunakan emosi, sehingga nantinya keputusan terbaik akan dicapai dan semua pihak bisa menerima dengan lapang dada langkah yang nantinya diambil oleh Pemerintah.

Kepada Dinas Perhubungan, Pastika meminta agar secara serius mengawal permasalahan angkutan online ini dan begitu pula halnya kepada Dinas Kehutanan dan Bappeda untuk membuat surat untuk yang ketiga kalinya kepada Menteri Kehutanan dan

Lingkungan Hidup yang ditembuskan ke Menteri Perikanan dan Kelautan dan Menteri Kemaritiman untuk permasalahan reklamasi Teluk Benoa, sehingga akan segera tahu jawaban dari pemerintah pusat apakah melanjutkan pembangunan atau menundanya.

Di bagian lain, Pastika juga kembali mengingatkan masyarakatnya akan hadirnya para kompetitor baru dalam dunia pariwisata yang salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi. Kedua wilayah tersebut memiliki sejumlah pantai indah yang dimilikinya dan dengan mulai dikembangkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika , NTB sangat berpeluang menyedot para wisatawan yang selama ini berkunjung ke Bali untuk beralih. Kekhawatiran akan akibat lebih dalam tentang persetujuan yang tidak kunjung selesai membuat gubernur selalu melakukan persuasi untuk tetap mempertahankan citra Bali sebagai wilayah dengan konsep wisata sehingga ekonomi masyarakat tetap terbantu. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep pariwisata lainnya selain pariwisata budaya. Dengan demikian kedepannya sektor pariwisata masih merupakan andalan Bali masih tetap memberikan peluang kerja bagi para generasi muda.

Gb 27: Mandalika NTB



Pelaksanaan simakrama sebagai sebuah even yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dipandu oleh Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng. Dalam acara tersebut, berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Bali. Sebagai contoh, aspirasi generasi muda juga disampaikan oleh Ria Asteria dimana ia mengajak para generasi muda untuk berkontribusi positif dalam pembangunan Bali. Pemuda tidak hanya bisa mengkritik tetapi juga harus berperan aktif dalam pembangunan Bali. Ketut Wenten asal Nusa Penida yang selalu hadir dalam setiap simakrama juga menyampaikan sejumlah persoalan yang muncul di kecamatan Nusa Penida diantaranya indikasi kerugian LPD Desa Sebungus Kecamatan Nusa Penida Klungkung sebesar 897 juta Rupiah. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Inengah Laba yang mengatakan Tim yang diturunkannya ke lokasi tidak menemukan fakta tersebut, namun sebaliknya LPD tersebut berhasil meraup keuntungan.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Pastika meminta agar Karo Ekbang memanggil Kelihan Banjar setempat agar persoalan menjadi jelas. Masih menjawab persoalan di Nusa Penida, pasca runtuhnya Jembatan Kuning, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Astawa Riadi, menjelaskan bahwa setelah melalui koordinasi dengan Bupati Klungkung dan Balai Jalan Nasional Wilayah VIII, Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya akan membantu pembangunan jembatan sementara, disamping juga akan membangun jembatan lainnya yang sifatnya permanen dan bisa dilalui kendaraan bermotor. Untuk yang permanen pemerintah Bali sudah punya DED (*Detailed engineering Design*). Untuk jembatan sementara dibangun agar masyarakat bisa menyeberang.

Di bagian akhir simakrama, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Jero Gede Suwena Upadesa, menyampaikan tentang pentingnya peran Desa Pekraman yang ada di Bali dalam menjaga adat, budaya dan tradisi dari masyarakat Bali dan mengajak masyarakat Bali untuk selalu menyelesaikan permasalahan dengan memegang slogan *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh*.

([http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2706/Terkait-Reklamasi-Telok-Benoa--dan-Angkutan-Umum-Berbasis-Onlinekoma--Pastika-Tegaskan-Tunggu-Keputusan-Pusat/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018](http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2706/Terkait-Reklamasi-Telok-Benoa--dan-Angkutan-Umum-Berbasis-Onlinekoma--Pastika-Tegaskan-Tunggu-Keputusan-Pusat/Diakses%20pada%20Sabtu%2C%2020%20Januari%202018))

Menurut Pastika, demonstrasi adalah hak masing-masing warga negara. Namun demikian, etika demonstrasi harus dijaga demi kelancaran dan ketenangan. Di pihak lain, ada sebuah peristiwa yang membuat Pastika kecewa. Gubernur Pastika menyayangkan terjadinya penurunan bendera merah putih pada saat terjadinya demonstrasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 25 Agustus lalu di kantor DPRD Provinsi Bali. Menurutnya tindakan penurunan bendera dengan menaikkan bendera lain merupakan bentuk pelanggaran undang-undang. Demikian disampaikannya saat melakukan simakrama dengan masyarakat di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Tindakan ini juga merupakan bentuk pelecehan terhadap negara. Hal ini dikarenakan bendera, bahasa dan lambang negara diatur oleh undang-undang.

Menurutnya hal ini bukan delik aduan, sehingga polisi bisa bertindak. Pastika hanya menginginkan kesadaran dari masyarakat agar tidak berbuat anarkhis dan melanggar etika. Menurut Pastika hal ini tidak bisa dibiarkan dan yang melakukan seharusnya bisa ditindak sebagai bentuk pelajaran. Terkait masalah kejelasan kelanjutan tentang reklamasi Teluk Benoa, Pastika mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat ke Menteri kehutanan dan lingkungan Hidup. Tidak berhenti sampai di sana Pastika juga ia juga menyusulkan surat kedua dengan tembusan kepada Menteri Kemaritiman dan Menteri kelautan .

Pastika menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Berikut alasan Pastika terkait dengan masalah ini:

Mendesak kepada pemerintah sama dengan memberontak. Saya tidak tuli, saya juga tidak bongol, tapi saya tidak bisa memaksa presiden untuk mencabut peraturan presiden tentang reklamasi ini. Itu namanya Insurgensi, pemerintah dibawahnya melawan pemerintah yang di atasnya, itu tidak boleh.

Keluhan terhadap terjadinya aksi demonstrasi tersebut juga dikeluhkan peserta simakrama yaitu I Wayan Suata, asal Kuta. Ia yang bekerja di sektor pariwisata. Dengan demonstrasi tersebut dia mengalami sejumlah kerugian. Berikut kutipan I Wayan Suata tentang kekurangrespekan terhadap aksi demonstrasi yang kurang simpatik:

Sebenarnya bukan masalah pro atau kontra tapi demonstrasi ini merugikan banyak orang dan kepentingan publik. Banyak tamu yang terlambat dijemput, dan banyak yang ketinggalan pesawat karena macet yang terjadi di jalan.

Menanggapi komplain ini, Pastika mengingatkan agar para pendemo melakukan aksinya dengan tidak merugikan orang lain. Apalagi jika anarkis, maka Pastika menyebutnya dengan bunuh diri. Artinya membunuh Bali dengan memunculkan kekacauan sehingga citra Bali jatuh.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2573/Gubernur-Pastika-Sayangkan-Aksi-Penurunan-Bendera-Merah-Putih-saat-Demonstrasi-Tolak-Reklamasi/Diakses-pada: Sabtu, 20 Januari 2018>)

Terkait dengan “for Bali” oleh pemerintah Bali mempersepsikan sebagai partner bukan lawan meskipun pada awalnya berseberangan, sebagaimana dijelaskan oleh Bagus Suryo:

Mungkin awalnya seperti bersebrangan tapi sekarang sudah menjadi partner. Partner dalam arti karena apapun yang mereka lakukan adalah suatu yayasan yang memang aktif dalam hal penolakan terhadap perusakan lingkungan. Hal ini karena pemerintah daerah tidak hanya akan melihat dari sisi reklamasi saja walaupun dominannya dia disana. Namun organisasi ini juga menangani hal-hal yang bersifat lingkungan secara luas sehingga dia adalah menjadi dia akan memberikan suatu masukan dan kritikan kepada kita terhadap pengelolaan lingkungan di Bali.

Gb 28 : ForBali tolak reklamasi teluk Benoa



Dengan demikian tidak ada persoalan antara pemerintah dengan For Bali, sebagai organisasi pecinta lingkungan. Partner akan memberikan kritikan dan masukan sebagai bahan diskusi bagi pemerintah Bali. Sekarang ini, baik For Bali dan pemprov Bali sudah menjadi pihak yang saling mendengarkan. Ketika pemerintah mempunyai pendapat maka for Bali diajak berembung, sebaliknya ketika yayasan punya pendapat maka akan didengarkan juga oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada hal yang bersifat pertentangan yang ekstrem sebagaimana awal-awal pertentangan for Bali terhadap reklamasi.

Beberapa kali pertemuan dilaksanakan secara kekeluargaan. Kritikan ataupun masukan yang disampaikan oleh yayasan for Bali ini selalu didengar oleh pemerintah dan

apapun kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah diterima oleh mereka. Artinya sama-sama menerima, karena penolakan adalah aspirasi mereka dan pemerintah Bali berwajib menyampaikan aspirasi tersebut. Pada prinsipnya ada isu yang disepakati bersama yaitu isu lingkungan hidup, meski dalam penolakan reklamasi pemerintah bersifat netral. Perlunya komunikasi membuktikan bahwa prasangka semakin mengecil ketika pemerintah Bali mengetahui sepak terjang for Bali, demikian juga sebaliknya. Pada awalnya terkesan konflik yang ekstrem diantara keduanya, namun lama kelamaan konflik mereda karena pemahaman sudah terbentuk ketika sudah duduk bersama.

Bahkan forum PB3AS mendapatkan apresiasi dari pemerintah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kabiro Humas dan protokol :

Ya kemarin sudah dapat nominasi 40 inovasi terbaik di kementrian. Dari 3000 inovasi yang masuk, 3200 yang masuk ke departemen jadi kita bersaing antara departemen antara pelebagaan, pemerintah provinsi, kabupaten dan swasta yang melakukan inovasi kita termasuk 40 besar, maju ke 5 besar untuk bertahan di penilaian pengkritikan internasional gagal, karena yang masuk hanya satu dari masaki batang namanya itu yang tembus ke tingkat internasional

Di sisi lain, berdasarkan laporan LSM For Bali dan KONTRAS ke Komnas HAM mengenai masalah yang dihadapi Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) di Bandara Ngurah Rai dan isu Reklamasi di Teluk Benoa menuai respon dari Komnas HAM. Tim Komnas yang dipimpin Komisioner HAM Nurkholis, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperoleh data dan fakta kedua masalah tersebut.

Nurcholis mengatakan bahwa yang diinginkan adalah solusi untuk kebaikan bersama. Tidak ada masalah yang bersifat mistik, namun semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut tugas utama dari Komnas HAM adalah untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap masalah yang dilaporkan, melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bertikai, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan.

Adapun untuk permasalahan Reklamasi Teluk Benoa, Nurcholis menyatakan bahwa hal pertama yang dicari pihak Komnas HAM adalah, apakah ada degradasi terhadap kehidupan masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya kalau nantinya dilakukan reklamasi? Apakah ada potensi degradasi terhadap lingkungan alam akibat reklamasi dan apakah ada potensi terjadinya intimidasi terhadap kelompok yang kontra reklamasi? Untuk permasalahan-permasalahan tersebut akan dibuka forum-forum konsultasi agar didapat informasi-informasi yang jelas yang nantinya bisa divalidasi untuk dijadikan data referensi. Hal utama yang diinginkan Komnas HAM adalah mencegah terjadinya

perselisihan-perselisihan antar kelompok yang nantinya bisa menimbulkan konflik-konflik horisontal.

Selain itu Gubernur Bali, Mangku Pastika, yang didampingi Sekretaris Daerah Tjok Ngurah Pemayun, Kepala Biro Humas Ketut Teneng, Kepala Biro Hukum Wayan Sugiada, Kepala Biro Ekbang I Gede Suarjana, dan Kepala Dinas Perindag Ni Wayan Kusumawathi, menjelaskan bahwa untuk masalah reklamasi, Gubernur menjelaskan masalah kondisi dari teluk Benoa pada saat ini, dan mengajak Komnas HAM juga memikirkan apa yang terjadi ke depan seandainya lokasi ini dibiarkan atau dilakukan suatu revitalisasi. Untuk itu, Gubernur mengharapkan Komnas HAM bisa menjadi mediator dan mencari solusi, dengan melakukan pembahasan secara transparan dan jernih terlepas unsur-unsur politik demi kebaikan masyarakat Bali.

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/579/KOMNAS-HAM-SIAP-MEDIASI-MASALAH-P2B-DAN-REKLAMASI>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Semua komponen berhak mengutarakan pendapat tentang rencana reklamasi Teluk Benoa yang belakangan mengundang pro dan kontra. Namun sebenarnya, rencana ini merupakan sebuah antisipasi jauh ke depan dan mungkin baru dinikmati 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Tingginya alih fungsi lahan produktif sejalan dengan berkembangnya pembangunan di Pulau Dewata menjadi salah satu hal yang mendasari bergulirnya rencana ini. Penambahan lahan baru melalui reklamasi diharapkan dapat menjadi satu alternatif alih fungsi lahan.

Karo Humas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, menjelaskan bahwa secara alami pesatnya laju pembangunan belakangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan. Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, dalam kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1997-2011, lahan produktif berkurang mencapai 436 hektare atau 0,50 persen tiap tahunnya. Pada tahun 1997, lahan produktif di Bali tercatat 87.849 hektare dan pada tahun 2011 tercatat 81.744 hektare. Melihat pesatnya pembangunan dalam dua tahun terakhir, data tersebut kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang.

Melihat kecenderungan tersebut, Bali yang secara geografis sangat sempit, terus mengalami pengurangan lahan pertanian karena alih fungsi baik untuk pemukiman maupun sarana pariwisata. Berangkat dari fakta tersebut, Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam menjaga perkembangan pembangunan pariwisata agar sejalan dengan kelestarian pertanian sebagai nafas kebudayaan Bali. Menurutnya, reklamasi bisa menjadi satu alternatif untuk mencegah makin menyusutnya lahan produktif.

Namun demikian, proses reklamasi ini masih sangat panjang dan memerlukan pemikiran bersama untuk mewujudkannya, sehingga nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali di masa mendatang. Ketut Teneng berharap, semua pihak bisa menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan jauh ke depan. Mengenai kajian yang lebih teknis, sepatutnya dipercayakan kepada pihak yang berkompeten. (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.44 wib)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap berbagai masukan baik berupa saran maupun kritik terkait rencana reklamasi Teluk Benoa yang mengemukakan pada diskusi terbuka di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada bulan Mei. Khusus terkait SK Nomor : 2138/02-C/HK/2012 Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, tim hukum gubernur mulai bergerak untuk mempelajari serta mendalami berbagai pendapat yang berkembang. Setelah digodok secara intern, berikutnya Pemprov Bali juga akan membahasnya dengan DPRD Bali dan mengundang sejumlah komponen dan praktisi hukum yang lebih berkompeten. Ketut Teneng sebagai Karo Humas berharap, pembahasan secara lebih spesifik mampu menghasilkan solusi yang lebih baik.

Pihak pemerintah Bali berharap, semua komponen menyikapi rencana ini dengan jernih dan pikiran terbuka. Menurutnya, rencana ini berangkat dari pemikiran antisipasi jauh ke depan dan sama sekali tak identik dengan menjual Bali. Rencana ini tidak berarti menjual Bali, justru kalau rencana reklamasi ini bisa terealisasi, Bali dapat menambah luas wilayah.

Karo Humas Ketut Teneng juga menguraikan sejumlah manfaat positif dari rencana reklamasi ini. Selain berfungsi sebagai daratan penyangga terkait mitigasi bencana tsunami, reklamasi juga menjadi salah satu solusi dari kecenderungan makin meningkatnya alih fungsi lahan produktif. Lebih dari itu, Bali juga akan menambah luas hutan jika rencana ini terwujud yaitu dari 800 hektare, dengan 50 persen lahan hasil reklamasi akan dihijaukan.

Pemda Bali juga menyatakan alasan bahwa reklamasi juga akan berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan. Pengembangan destinasi pariwisata juga menjadi pertimbangan dari bergulirnya rencana reklamasi Teluk Benoa ini. Ketut Keneng mencoba membuka pikiran masyarakat dengan menjelaskan bahwa ada ribuan lulusan universitas dan sekolah kejuruan yang setiap tahunnya siap terjun ke dunia kerja. Jika tidak diantisipasi dengan upaya penambahan lapangan kerja baru, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, maka akan terjadi banyak pengangguran. Di samping itu, pariwisata Bali juga perlu alternatif destinasi baru untuk menarik kunjungan wisatawan sebagaimana negara lain berlomba-lomba

menambah destinasi baru. Ketut Teneng berharap agar rencana ini disikapi secara lebih jernih serta tidak selalu didasari atas prasangka negatif. Mengenai kajian teknis, pihaknya mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada lembaga berwenang

Dalam kesempatan itu, karo Humas kembali menegaskan bahwa SK yang dikeluarkan Gubernur belum merupakan ijin untuk melakukan kegiatan reklamasi. SK tersebut masih banyak mengandung batasan-batasan. SK dibuat agar pihak investor bisa mulai bergerak melengkapi prasyarat yang dibutuhkan. Dalam klausul ke-empat SK tersebut, PT.Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) selaku pemegang ijin diwajibkan mengikuti dan mentaati prosedur perundangan yang berlaku, melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan daratan penyangga dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan Teluk Benoa. Selain itu, PT. TWBI juga wajib menyusun AMDAL, mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat di tempat usahanya serta merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. Dengan demikian prosesnya masih panjang, belum ada keputusan final.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan, sudah melalui proses dan mekanisme pembahasan, mulai dari permohonan yang diajukan investor, rekomendasi DPRD Provinsi Bali, sampai turunnya Keputusan Gubernur. Rekomendasi tersebut masih memerlukan beberapa kajian pendukung, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta beberapa tahapan perizinan yang wajib dimiliki oleh investor, di mana izin-izin tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi tersebut belum cukup dipakai acuan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi, tetapi baru sebatas sebagai dasar bagi investor melakukan kegiatan pengkajian, survey, serta pengurusan perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini, tugas bersama adalah mengawasi pelaksanaan kajian tersebut kalau memang benar-benar memenuhi semua aspek, untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Dalam membuat kajian *feasibility* tersebut berbagai peraturan perundang-undangan masih perlu diacu, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan, antara lain Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), Rancangan Perda Arahkan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Draft Arahkan

Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang sedang disusun dokumen akademisnya di Pemerintah Provinsi Bali. Sementara Pemerintah Kabupaten Badung juga sedang menyiapkan Raperda Arahkan Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Badung sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Keputusan ini, pemerintah Bali dengan tegas mencantumkan hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pengembangan rencana reklamasi ini oleh calon investor.

(<http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/artikel-detail/53/REKLAMASI-TELUK-BENOA-UNTUK-MASA-DEPAN-BALI>, akses 20 Juni 2018)

Sementara itu, wakil ketua DPRD Bali, Ketut Suwandi mendukung agar *Feasibility Study* (FS) yang lebih komprehensif terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa tetap dilanjutkan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah reklamasi layak atau tidak untuk dilakukan. Suwandi meminta agar semua pihak tidak berandai-andai tentang dampak reklamasi jika itu nantinya dilaksanakan. FS tak hanya dilakukan oleh pihak investor. Sebaiknya seluruh komponen masyarakat memberi kesempatan pada pihak yang berkompeten untuk melakukan kajian. Presentasi di Bappeda maupun DPRD terbuka bagi media. Semua pihak tetap menjaga kondusifitas Bali menjelang pelaksanaan berbagai *event* internasional seperti Miss World, APEC, BDF dan lainnya.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/301/Dewan-Minta-Kajian-Reklamasi-Teluk-Benoa-Dilanjutkan/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Tradisi diskusi di Bali yang melibatkan berbagai komponen masyarakat sebagaimana telah disinggung di atas disebut dengan *simakrama*. *Simakrama* sudah dilakukan puluhan kali. Beberapa kali forum ini membahas tentang kasus teluk Benoa yang sampai saat ini masih dalam upaya penyelesaian, selain topik lain yang dianggap urgen bagi eksistensi Bali. *Simakrama* Gubernur Bali Sabtu, 11 Februari 2017, digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama kantor Gubernur Bali ini megusung tema “Prospek Pariwisata Bali”. Menurut Karo humas dan Protokol, dipilihnya tema dalam *simakrama* kali ini sejalan dengan upaya Pemprov dalam mendorong kemajuan sektor yang menjadi lokomotif bagi perekonomian Bali tersebut. Terlebih, belakangan sektor pariwisata dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang makin ketat. Melalui *simakrama* kali ini, Gubernur Pastika ingin memperoleh berbagai masukan terkait dengan pembangunan bidang kepariwisataan sehingga mengundang seluruh elemen dalam masyarakat untuk hadir pada pelaksanaan *simakrama* ini. Masyarakat

yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan simakrama diharapkan hadir pukul 08.00 wita untuk proses registrasi. Sebagaimana pelaksanaan simakrama sebelumnya, acara dimulai pukul 09.00 wita – 12.00 wita. Simakrama diakhiri dengan Puja Tri Sandhya dan makan siang bersama.

(<http://www.phribali.or.id/general/simakrama-gubernur-bali-prospek-pariwisata-bali.htm>, akses 20 Mei 2018)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga menggelar diskusi terbuka membahas rencana reklamasi Teluk Benoa. Diskusi digelar di ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Sabtu, 3 Mei 2017 berlangsung hangat. Hampir seluruh komponen yang diundang hadir dan diberi kesempatan bicara. Gubernur Mangku Pastika mengucapkan terima kasih atas kehadiran komponen masyarakat dalam acara yang dinilai sangat penting tersebut. Pastika juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan konstruktif terhadap rencana pembangunan yang tengah bergulir.

Berbagai respon dan tanggapan dinilai sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap Bali. Hanya saja, Gubernur berharap kecintaan dan kepedulian tersebut diletakkan secara proporsional demi kemajuan Bali. Menurutnya, reaksi pro dan kontra terkait rencana reklamasi Teluk Benoa bergulir tanpa arah yang jelas. Diskusi yang melibatkan seluruh komponen terkait diharapkan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang apa yang akan dilaksanakan di kawasan Teluk Benoa.

Suasana diskusi berjalan dinamis. Kelompok yang pro dan kontra, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Guru besar FH Unud Prof.Dr. Ibrahim R,SH,MH dan Ketua WALHI Wayan ‘Gendo’ Suardana tetap berharap SK Gubernur Bali Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa dikaji ulang. Di sisi lain, friksi juga terjadi diantara perwakilan masyarakat yang berasal dari kawasan sekitar Teluk Benoa. Secara garis besar, masyarakat setempat berharap agar Pulau Pudut direhabilitasi karena luasnya makin berkurang.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/300/Gubernur-Apresiasi-Saran-dan-Masukan-Terkait-Rencana-Reklamasi-Teluk-Benoa/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 13.00 wib).

Ketut Teneng, Kabiro Humas menjelaskan bahwa, kegiatan Simakrama ini bertujuan memberi kesempatan bagi segenap komponen masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mendiskusikan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan

Teluk Benoa yang belakangan memicu pro dan kontra. Dengan demikian informasi yang berkembang tidak sepotong sepotong dan tidak bias.

Menurut Teneng, undangan untuk menghadiri diskusi telah beberapa kali disampaikan Gubernur Mangku Pastika pada beberapa kesempatan. Pada ajang diskusi itu, komponen masyarakat yang hadir dipersilahkan menyampaikan berbagai pendapat mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka yang hadir adalah pihak akademisi, DPRD, LSM, perwakilan organisasi, mahasiswa hingga komponen masyarakat lainnya. Kegiatan ini sengaja digelar pada hari libur agar semua pihak berkesempatan hadir. Tidak ketinggalan, pihak media juga diundang resmi dalam acara ini. Undangan resmi lainnya antara lain Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua BPK Perwakilan Bali, Bupati/Walikota se-Bali, para rektor dan BEM sejumlah universitas di Denpasar, PHDI, KIP, KIP, PWI, AJI, Ketua Ombudsman Provinsi Bali, MUDP dan Pimpinan SKPD Provinsi Bali. Selain itu, Undangan resmi juga disampaikan kepada tokoh masyarakat di kawasan rencana reklamasi antara lain Lurah Tanjung Benoa I Wayan Kembar beserta tokoh masyarakat setempat, Lurah Benoa I Wayan Solo, Lurah Jimbaran, Kedonganan dan Tuban. Bendesa adat dari Tanjung Benoa, Tengkulung, Kelan, Bualu, Kedonganan, Jimbaran, Tuban, kelompok nelayan kawasan teluk Benoa, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER), pemerhati tata ruang dan Ketua LPM dari wilayah itu juga diundang. Dengan banyaknya peserta yang hadir, maka semakin lengkaplah uraian pembicaraan reklamasi teluk Benoa tanpa bias informasi. Diskusi diharapkan menjadi bukti transparansi pemda Bali untuk masalah ini.

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/297/Gubernur-Undang-Masyarakat-Bicara-Soal-Reklamasi-Tanjung-Benoa>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Di penghujung akhir tahun, Simakrama Gubernur Bali kembali digelar setelah beberapa bulan mengalami penundaan. Kali ini, Simakrama ke- 91 tersebut kembali digelar di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar Sabtu, 30 Desember 2017. Kegiatan yang diselenggarakan di penghujung tahun 2017 ini dikemas dengan nuansa yang sedikit berbeda dari pelaksanaan Simakrama pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan mengusung tema khusus 'Evaluasi Akhir Tahun', Gubernur Pastika berharap para peserta dapat memberi penilaian dan masukan terkait kinerja jajarannya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pastika memberikan kesempatan kepada I Putu Eka Putra, Alumni SMA Negeri Bali Mandara asal Desa Seraya, Karangasem untuk bicara pertama. Gubernur Pastika meminta kepada Putra untuk menceritakan perjalanannya hingga menjadi bagian dari SMA Negeri Bali Mandara dan kini menjalani pendidikan di Akademi Angkatan

Laut. Putra merupakan salah satu dari 3 taruna asal Bali yang berkesempatan untuk menjalani pendidikan di sekolah tersebut.

Menurut Putra, SMA/SMK Negeri Bali Mandara merupakan sekolah yang bagus dan berkualitas. Di SMA Bali mandara diceritakan Putra tidak hanya belajar di kelas, belajar formal, namun juga diajarkan untuk menjadi pemimpin. Gubernur Bali yang dalam simakrama didampingi Ny. Ayu Pastika dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bali mengakui jika program Bali Mandara baik jilid 1 maupun 2 hingga kini masih belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Meski demikian, diungkapkan Pastika program-program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama yang dijalankan. Pastika berharap di tahun 2018 dimana tahun terakhir kepemimpinannya sebelum masyarakat Bali "mendapatkan" pemimpin baru, program yang belum terealisasi bisa diselesaikan meski banyak yang masih kurang. Dengan dukungan masyarakat, Pastika yakin bisa menjalankan sisa kepemimpinannya dengan baik.

Di bidang kesehatan, Pastika menjelaskan jika Rumah Sakit Mata Bali Mandara saat ini telah di kembangkan dengan fasilitas yang semakin lengkap. Meski IMB gedung baru belum keluar, namun operasional tetap berlangsung secara normal. Terkait dengan Pariwisata Bali pasca erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Pastika mengatakan jika pariwisata Bali saat ini aman. Dijelaskan olehnya bahwa daerah berbahaya bagi aktifitas manusia adalah di 22 Desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III.

<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/12/31/gubernur-bali-gelar-simakrama-evaluasi-akhir-tahun>

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil inisiatif mengangkat persoalan alih fungsi lahan pertanian dalam pelaksanaan Simakrama ke-89 yang digelar pada hari Sabtu 27 Mei 2017. Rencana tersebut diinformasikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH. MH dalam siaran persnya. Dewa Mahendra mengatakan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali ini mengusung tema 'Alih Fungsi Lahan dan Solusinya'. Dia mengundang seluruh elemen dan tokoh masyarakat, khususnya mereka yang peduli terhadap pelestarian lahan pertanian untuk hadir dan memberikan solusi yang aplikatif. Pemprov Bali juga menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya antara lain Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra dan Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan simakrama diharapkan hadir pukul 08.00 WITA untuk proses registrasi. Sebagaimana pelaksanaan simakrama sebelumnya, acara dimulai pukul 09.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA. Simakrama diakhiri dengan Puja Trisandya dan makan siang bersama. Bagi masyarakat yang tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut, dapat menyimak pelaksanaan Simakrama melalui saluran Pro 1 RRI Denpasar 88,6 MHz atau menyaksikan langsung melalui *live streaming*.

(<https://www.beritabali.com/read/2017/05/24/201705240008/Simakrama-Gubernur-Digelar-Minggu-Ini-Angkat-Tema-34Alih-Fungsi-Lahan-dan-Solusinya34.html>)

Beberapa forum komunikasi telah dipersiapkan oleh pemerintah Bali sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Masing-masing forum tidak hanya digelar sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Ida Surya:

Ada forum yang namanya PB3AS Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja Itu kami adakan **setiap minggu pagi**. Masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya, kritiknya terhadap apapun itu baik itu terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan. Masyarakat juga boleh secara terbuka ngomong di podium itu yang dilakukan hari minggu pagi. Ada juga kegiatan simakrama. Dalam kegiatan ini, gubernur akan bertemu langsung dengan masyarakat secara terbuka. Seluruh elemen masyarakat diundang **setiap bulan sekali diakhir bulan hari sabtu**. Itulah dua media yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat untuk berbagai permasalahan apapun, termasuk hal yang berkaitan dengan reklamasi.

Gb 29 :Mangku Wayan Suteja (Aktivis For Bali) BerBicara Tolak Reklamasi



PB3AS 27 Maret 2016 - Mangku Wayan Suteja
(aktivis For Bali)

(Sumber: <http://youtube> BP3AS 27 Maret 2016-Mangku Wayan Suteja, akses tanggal 22 September 2018)

Iklim komunikasi dalam forum terkendali dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masing-masing desa adat melakukan koordinasi siapa dan apa yang ingin dikatakan dalam forum tersebut sehingga oknum penyusup ataupun provokator tidak mudah masuk, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ida Bagus Surya:

Nah kenapa terjadi komunikasi yang baik, pengolahan informasi yang baik, karena kebetulan ada tipikal yang saya katakan tadi. Secara umum masyarakat Bali tidak ingin ada keributan tidak ingin ada kekacauan ataupun bentrokan. Sehingga ketika mereka berbeda pendapat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat atas reklamasi tersebut, masing-masing desa adat mengkoordinir diri mereka untuk melakukan unjuk rasa secara damai. Jadi yang turun itu betul-betul orangnya jelas dan penyampaiannya jelas, tidak liar tidak ada susupan dari manapun karena desa adat yang mengendalikan semua gerakan itu.

Dengan demikian, sasaran komunikasi tidak hanya dilakukan secara khusus untuk semua desa adat yang terkena dampak reklamasi, namun juga semua wilayah Bali sebagaimana hal ini dinyatakan kembali oleh Ida Surya:

Awalnya yang berdampak saja namun begitu karena itu sudah menyentuh ke hal yang bersifat ritual sehingga mengembang menjadi wilayah yang teritorialnya tidak terkena dampak langsung. Karena desa-desa lain pun juga melakukan demo. Namun mereka juga melakukan hal yang sama. Itulah yang saya katakan tadi itu, terkoordinir baik oleh koordinator lapangan mereka.

C. PERAN KEARIFAN LOKAL BALI

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi harmonisasi. Salah satu budaya yang khas adalah pakaian “udeng”. Pakaian ini mengandung filosofi yang bijak dalam mengendalikan perilaku manusia. Pakaian ini juga berperan ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ida Surya:

Pakaian pun di Bali ikut berperan. Pendemo dipantau langsung oleh desa adat mereka dengan pakaian, maaf ya saya terus terang saja buka di sini kalau orang Bali melakukan hal-hal seperti itu dia pakai udeng, udeng itu tujuannya adalah untuk mengikatkan pikiran kita supaya tidak liar itu mitosnya dulu, filosofinya. Dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Pakaian akan memfokuskan pada sesuatu hal yang memang tujuan

utama supaya tidak membias. Kalau dibiarkan dengan leluasa kadang-kadang emosional mereka itu tidak terkendali apalagi kalau masyarakat sudah berkumpul susah dikendalikan. Tapi dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekankan untuk mengikatkan pikiran kamu supaya fokus jangan bias.

Gb 30 : Pakaian Udeng sebagai salah satu bentuk kearifan lokal Bali



Dengan kearifan lokal seperti pakaian tadi, demo-demo yang terjadi di Bali termasuk yang berkaitan dengan reklamasi selama ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Tetapi di pihak lain tetap saja dari pemerintah tetap minta bantuan keamanan. Hal ini hanya bersifat antisipasi. Keamanan tetap berjaga di lokasi-lokasi tertentu untuk mengecek apakah ada orang lain yang masuk sebagai penyusup atau tidak.

Faktor keagamaan dan media komunikasi yang tepat akan sangat betul-betul mendukung iklim komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat adat Bali. Hadirnya tokoh-tokoh adat juga membawa dampak yang tidak kecil bagi terciptanya kesepakatan kedua belah pihak. Meski tidak sedikit bentuk pertemuan dengan kesepakatan yang alot, namun bagi pemerintah Bali tetap pada prinsip bahwa kesepakatan harus dijunjung tinggi. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh Ida Surya selaku Kabiro Humas dan Protokol:

Rembug-rembug atau musyawarah tetap dilakukan dari pihak pemerintah ketika menginginkan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menentukan tokoh-tokohnya walaupun kadang-kadang tidak ada titik temu dalam diskusi. Tetapi pada prinsipnya pemerintah provinsi Bali pada akhirnya juga menyesuaikan dan mengikuti apa keinginan masyarakat.

Pemerintah Bali pada prinsipnya memposisikan diri sebagai penengah antara keinginan pusat dengan keinginan masyarakat Bali. Hal ini dikarenakan dasar hukum reklamasi teluk Benoa merupakan peraturan presiden. Namun demikian, keterlibatan pemerintah provinsi tentu saja tidak bisa dielakkan. Oleh karenanya pemerintah Bali

berupaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Cara yang selama ini ditempuh masih bersifat musyawarah diantara dua pihak tanpa rekayasa. Kalaupun selama ini masyarakat adat menolak reklamasi, maka pemprov Bali juga mengatakan secara jujur bahwa kepada pemerintah pusat bahwa telah terjadi penolakan di awal.

Media yang digunakan tentu sangat beragam mulai dari media lama dan media baru. Media cetak dan elektronik yang sampai saat ini masih relevan sebagai media massa tetap dipilih oleh pemprov Bali. Disamping itu, media sosial yang sedang dalam trend juga tidak kalah. Semua media digunakan sebagai sarana berdialog antara masyarakat adat dengan pemprov Bali. Pemprov memiliki website resmi birohumas.baliprov.go.id. Ada juga instagram @protokolbali sebagai media sosial yang sangat digemari kaum milenial meskipun baru memiliki followers kurang dari 500 orang (<https://www.instagram.com/protokolbali/akses> 26 September 2018). Informasi yang ditulis antara lain berupa semua kegiatan terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan Bali termasuk perkembangan komunikasi dalam forum-forum PB3AS maupun Simakrama. Dengan demikian masyarakat yang tidak mengikuti langsung 2 forum tersebut tetap masih bisa menyimak perkembangan keadaan.

Selain mengandalkan media komunikasi, tentu saja pemerintah Bali tidak bisa meninggalkan peran ketua adat sebagai pemimpin pendapat. Struktur masyarakat Bali dengan kearifan lokal yang teramat kental cenderung menyerahkan keputusannya ke publik figur atau tetua adat mereka sebagai orang yang memiliki *legitimate* kekuatan yang lebih besar. Namun demikian tetua adat sendiri sifatnya bertingkat atau memiliki strata sebagaimana yang dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Lembaga adat yang ada di Bali juga ada stratanya seperti pemerintahan dinas. Jadi, desa adat yang ada di tingkat desa dipimpin oleh tetua desa adat. Tetua adat itu punya atasan lagi dia di tingkat kecamatan dan kabupaten disebut tetua madian terus di tingkat kabupatennya juga ada. Kalau di tingkat provinsi namanya tetua adat utama. Jadi pendekatannya adalah melalui struktur ini. dulu pada akhirnya kita bertemunya di tingkat desa. Beberapa kali diadakan pertemuan baik dari pihak pemerintah dengan struktur desa adat. Memang ucapan tetua yang didengar itu adalah memang tetua yang di tingkat desanya apapun kata mereka.

Gb 31: Pelantikan kelian Adat



Delod Peken, Kelian desa adat Pakraman Buleleng Ir. Nyoman Sutrisna, MM Sabtu (10/02/2018) dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Buleleng.

Proses demokrasi di Bali sangat transparan, yang dimulai dari pemilihan pendesa/kelihan adat. Proses ini sudah terjadi dari leluhur dulu sampai sekarang. Sehingga siapa pun yang terpilih sebagai pendesa adat adalah benar-benar orang yang bisa menjadi tauladan. Jadi tidak ada nuansa politis seperti yang banyak terjadi di Pilkada di banyak tempat di Indonesia. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Mereka yang terpilih adalah siapa yang bisa mempunyai kepribadian yang baik. Orang nya lebih bijaksana. Sehingga ketika beliau akan ngomong didengarkan betul oleh rakyatnya. Sebagaimana halnya di Jawa, kalau seorang kyai bicara pasti di dengar oleh umatnya, di sini juga seperti itu. Jadi yang terpilih itu adalah orang-orang yang betul-betul dituakan dan diteladani karena konteks seorang pendesa adat ini gak boleh tersentuh oleh nuansa kepentingan lain atau politis.

Emosional negatif atau marah apalagi agresif tidak mendapat tempat di Bali. Kalaupun ada anggota masyarakat yang “nyeleneh” satu dua kali biasanya hukum sosialnya lumayan berat. Mereka akan malu karena sampai di tegur oleh tetua desanya. Bahkan semangat untuk tidak melakukan konflik dalam memecahkan masalah juga diimplementasikan dalam skala yang lebih besar yaitu bagaimana sikapnya sebagai tuan rumah di daerah wisata dengan tamu dari manca negara, sebagaimana diungkapkan oleh kepala Biro Humas dan Protokol:

jadi bagaimana ya dengan karakter orang Bali yang pada intinya dia tidak ingin terjadi kericuhan karena kita tahu mungkin di Bali mutlak harus

bergantung dengan kenyamanan dan keamanan untuk bisa kita hidup. Dengan begitu orang-orang pada datang dan wisata ke Bali merasa tenang dan aman juga. Ketika wisata sudah bisa berkembang, tentu kita bisa cari kerja dan menghidupi keluarga kan seperti itu. Beda dengan daerah lain yang mungkin mereka punya sumber daya alam. Kalau kita hanya mengandalkan itu yang mempunyai dampak multi efek player ketika berwisata seperti itu.

Anarkisme disadari sepenuhnya oleh masyarakat Bali bahwa hal ini tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan bukan hanya semata-mata sektor wisata saja yang mungkin menjadi sepi, tetapi sektor ini akan menyeret sektor lainnya juga seperti transportasi, kuliner, UMKM, dan sebagainya. Jadi sedikit dari orang Bali yang menginginkan kekacauan. Kalaupun ada mungkin ya bisa dihitung dengan jari. Kadang-kadang ada masyarakat dengan vokal keras tetapi sampai saat ini pihak pemerintah Bali masih bisa mengatasi sehingga gejolak tidak begitu besar.

Dalam manajemen konflik beberapa prinsip akan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan, diantaranya prinsip partisipatif. Upaya pemerintah Bali dalam menciptakan prinsip partisipatif utamanya di internal dikembangkan dengan pola koordinasi yang kuat di dalam pemerintahan. Terlebih hal ini dilakukan dalam menghadapi kemungkinan apabila tiba-tiba perpres turun dan harus menerapkan isi perpres. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Bagus Suryo:

Tentunya secara keseluruhan Pak gubernur beserta seluruh jajarannya dan termasuk dengan musyawarah pimpinan daerah ya selalu berkoordinasi dan melakukan rembug bersama. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang bersifat seperti ini. Sebetulnya beliau telah melakukan beberapa hal yang berupa pertemuan-pertemuan dengan instansi pemerintah untuk antisipasi segala kemungkinan yang terjadi terhadap dampak surat yang keluar. Jadi rapat koordinasi itu selalu terjadi mengikuti perkembangan-perkembangan dari gejolak di masyarakat. Tentunya hasilnya juga dikomunikasikan langsung kepada di masyarakat.

Pemerintah Bali berusaha untuk selalu menyampaikan aspirasi masyarakatnya tanpa tendensi apa-apa. Akhirnya pemerintah sekarang juga sejalan dengan masyarakat, tidak ingin reklamasi itu dilakukan. Namun karena surat itu bersifat universal tidak hanya untuk Bali saja termasuk daerah lain juga sehingga masyarakat Bali dalam posisi dilematis. Penolakan hanya sepihak pada masyarakat Bali. Mereka menuntut untuk menghentikan reklamasi. Tetapi di pihak lain perpres itu juga mencakup Indonesia secara luas.

Gb 32 :Massa dari 39 Desa Adat di Bali Meminta Pemerintah Untuk Membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 (ANTARA FOTO/ Wira Suryantala)
CNN 25 Agustus 2014



Gb 33 : Reklamasi Teluk Benoa Bali, Pro dan Kontra Tak Kunjung Usai
Liputan 6, 24 Mei 2015



Kadang-kadang ada pihak tertentu yang tidak menginginkan kedamaian dalam konteks reklamasi sukses. Pemerintah Bali juga telah mengantisipasi hal ini dengan cukup mengandalkan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Tentunya hal seperti itu tidak bisa dipungkiri. Selalu ada saja orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin kadang-kadang memanfaatkan mengail di kekeruhan. Langkah pemerintah adalah melakukan beberapa kali pendekatan kepada desa adat dalam suatu gerakan penolakan. Masing-masing dari korlap harus tahu benar kondisi riil barisannya, sehingga tidak mungkin disusupi oleh kelompok-kelompok lain. Masing-masing tokoh harus hafal siapa-siapa yang ikut berdemo. Berdemo tidak dilarang oleh pemerintah, namun harus dilakukan dengan cantik dan baik.

Kekerasan akan menimbulkan kekacauan. Tentu saja kerugian yang akan didapat jika demo anarkhis yang dipilih, sehingga pemerintah Bali selalu siap melakukan pengawalan.

Komunikasi pemerintah Bali dengan masyarakatnya setidaknya menyiratkan sebuah pesan untuk keamanan Bali, demi kelangsungan kehidupan masyarakat Bali, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bagus Suryo:

Dari pemerintah saya menginginkan apapun pendapat masyarakat, apapun kepentingan masyarakat terhadap hal itu pada intinya adalah tetap menjaga kondusivitas keamanan Bali. Sehingga terciptalah kenyamanan bagi para wisatawan untuk bisa hidup di Bali. Karena ranahnya sudah di pusat, pemerintah daerah hanya bisa memfasilitasi atas aspirasi masyarakat

Untuk menjaga interaksi sosial tetap *sustainable*, pemerintah provinsi Bali secara berkesinambungan menjaga agar harmonitas itu terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Ada dua hal cara yang ditempuh pemerintah Bali: *pertama*, **pertemuan gubernur langsung kepada masyarakatnya** untuk dialog. Seluruh elemen masyarakat bisa langsung menyampaikan apa yang mereka inginkan. *Kedua*, disini ini ada **forum kerukunan antar umat beragama** itu juga sangat membantu pemerintah provinsi Bali untuk menjaga rasa toleransi rasa keharmonisan untuk Bali bisa aman.

Munculnya pemikiran yang kedua disebabkan karena Bali tidak boleh hanya menjaga masyarakat lokalnya saja tapi ada kehidupan heterogen. Harus ada upaya saling menjaga keharmonisan antara masyarakat pribumi dengan pendatang. Melalui paguyuban- paguyuban mereka itulah akan dikomunikasikan segala sesuatu untuk kepentingan Bali. Ada yang namanya “Pasundan”, terus yang di Sumatera Barat : “Minang Saiyo.” Sebagaimana masyarakat Bali, mereka juga sering melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif setiap bulan. Dengan demikian setiap pesan-pesan kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan melalui pertemuan pertemuan mereka.

Prinsip keharmonisan yang lain yang mendukung keharmonisan pola hubungan antar elemen masyarakat adalah prinsip Tri Hita Karana, sebagai ajaran untuk menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan lingkungan sekitar, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Bagus Suryo:

karena di Bali pemerintahannya tidak sama dengan di beberapa daerah ada dinas yang ada di Indonesia. Adat mereka itu hidup tidak hanya secara administrasi, tetapi hidup secara adat yang juga dibungkus dengan keagamaan. Karena setiap hari kita melakukan keagamaan akhirnya lahirnya sebuah kekeluargaan. Disini juga sebenarnya ada karakter dari orang Bali juga sih, kita itu tidak menyukai yang namanya konflik. Kita harus seimbang dalam hubungan dengan Tuhan kemudian antara manusia dan lingkungan. Kita ada

namaya *Tri Hita Karana*, itu konsep yang ada di Bali dan juga akhirnya menyebar ke penduduk pendatang. Karena kita melakukan hal seperti itu akhirnya budaya ini juga dilakukan oleh penduduk-penduduk pendatang, itulah yang menyebabkan di Bali itu rasa kekeluargaannya itu sangat dekat.

Dengan demikian, konflik jarang terjadi di Bali. Pemerintah provinsi Bali juga sangat konsen mengatasi konflik reklamasi ini. Beberapa penolakan dan ketidaksetujuan tentang reklamasi membuat pihak pemerintah menghentikan pembangunan. Dengan demikian tidak muncul pemberontakan besar. Jadi selama ini kondisi masih terkontrol. Hal ini mungkin yang menyebabkan mengapa reklamasi Teluk Benoa itu tidak seperti di Jakarta.

Dalam konsep *Tri Hita Karana*, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara tertentu mencerminkan hal bagaimana kita menghargai lingkungan. Ada yang namanya *tumpeg udong*, *tumpeg tanaman*, ada namanya *tumpeg landak*. Jadi itu adalah contoh yang diyakini masyarakat agar kita menjaga lingkungan ini agar lestari dan untuk kebutuhan kita. Adapun yang kedua adalah bagaimana kita menghargai sesama kita jadi hormati sesama kita terus yang ketiga adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi *Tri Hita Karana* yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bali disamping ada lagi satu prinsipnya adalah *Tat Twam Asi*, sebagaimana dijelaskan oleh kabiرو Humas dan protokol ini:

Tat Twam Asi itu adalah hidup bertoleransi antar kita. Intinya “Aku adalah kamu, kamu adalah aku”, sehingga kita dapat merasakan persaudaraan diantara kita walaupun mereka datang dari Sumatera, Kalimantan, Irian, Jawa. Jadi dengan prinsip *Tat Twam Asi* itulah yang membuat kita bisa hidup satu tanah di Bali untuk menjadi keharmonisan tapi yang berkaitan dengan reklamasi tentunya *Tat Twam Asi* itulah yang menjadi kata kunci.

Gb 34: *Tri Hita Karana*



Dengan demikian kearifan lokal tersebut setidaknya membantu dalam mengendalikan konflik antara masyarakat dengan pemerintah provinsi Bali. Kearifan lokal bisa mencegah masyarakat untuk bertindak tidak anarkhis kepada sesamanya.

BAB V

ANALISIS KRITIS TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI

Sebuah proyek reklamasi atau proses pembuatan lahan baru untuk memperbaiki suatu kawasan, tentu idealnya memiliki tujuan yang positif. Tidak saja untuk tujuan pengelolaan kawasan yang sudah tidak produktif, namun juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Banyak proyek reklamasi yang berjalan mulus tanpa batu sandungan. Sebagaimana hal ini dapat dijumpai dalam negara antara lain Dubai, Singapura, Mongolia, Belanda, Hongkong, Korea Selatan, China, dan Jepang. Di ke- 8 negara tersebut banyak mendapatkan acungan jempol masyarakat dunia karena kesuksesannya. Berbeda dengan Indonesia, reklamasi Jakarta dan reklamasi teluk Benoa Bali menuai penolakan dan demonstrasi dari masyarakat setempat. Bahkan penolakan tersebut bisa disebut berlarut-larut hingga belum mendatangkan kata sepakat. Pemerintah dan masyarakat menjadi saling menuduh bahwa masing-masing menyembunyikan suatu kepentingan yang harus dimenangkan.

Berkaca dari 8 negara yang sukses, akan bisa dilihat apa dampak yang terjadi dalam reklamasi tersebut. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I

REKLAMASI SUKSES DI 8 NEGARA DAN INDONESIA

NO.	NEGARA	MOTIF REKLAMASI	keterangan
1.	Dubai	Lambat laun minyak mengering sehingga dialihkan ke bisnis pariwisata	Sukses, Kegiatan pengurukan dilakukan Perusahaan Belanda bernama Van Oord Dredging, salah satu ahli reklamasi di dunia
2.	Singapura	Pulau Blakang Mati yang kemudian digabungkan dengan pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau Sentosa seluas 500 hektar ini menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan seperti hotel, taman, villa, dan arena permainan	Sukses, memiliki <i>sustainability plan</i> di Pulau Sentosa
3.	Mongolia	area bekas tambang di Ereen telah bertransformasi menjadi padang rumput yang memiliki banyak kegunaan bagi masyarakat lokal, terutama untuk kebutuhan penggembalaan ternak.	Sukses, Proyek reklamasi ini juga berhasil menyediakan sumber air minum bersih bagi masyarakat lokal yang sebelumnya memiliki kesulitan untuk mengakses air
4.	Belanda	Pelabuhan hasil reklamasi proyek	Sukses, menghasilkan

		Maaksvlakte 1 telah mencapai kapasitas maksimum, maka dibuka proyek Maasvlakte 2 yang menghasilkan pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial	pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial sejak tahun 2013
5.	Hongkong	Mengubah pulau terpencil menjadi kota baru dengan magnet utamanya bandara internasional Hongkong dan wisata belanja. Area Tung Chung saat ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Hongkong	Sukses, dari kota terpencil berubah wajah menjadi kota baru dengan magnet utamanya bandara internasional Hongkong dan wisata belanja
6.	Korea Selatan	Song Do International Business District juga telah menjadi tuan rumah bagi beberapa acara berskala internasional seperti Asian Games 2014 dan The World Education Forum 2015. Area Song Do International Business District sendiri mendapat perhatian besar dari masyarakat global setelah menjadi lokasi pembuatan video 'Gangnam Style' dan 'Right Now'	Sukses, Perencanaan proyek dilakukan secara matang, sistematis, dan informatif karena perencanaan pun ditampilkan dalam bentuk maket.
7.	China	Reklamasi China sudah ada sejak dinasti Qing, ketika para petani di daerah tersebut membutuhkan lahan agrikultural. Berbasis pengembangan kawasan industri dan pemukiman eco-city	Sukses, Reklamasi di Cao Fei Dian dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, sistematis, dan dengan tahapan pembangunan yang jelas. diprioritaskan pada pembangunan elemen-elemen pembentuk ruang yang dinilai memiliki signifikansi dan daya tarik yang tinggi
8.	Jepang	pembangunan Bandara Internasional Kansai dilanjutkan dengan pembuatan pulau buatan untuk membangun bandara internasional. Bandara Udara Internasional Kansai terletak di tengah Teluk Osaka	Sukses, Jepang berhasil melakukan revitalisasi Osaka dan menaikkan taraf perekonomian warga sekitarnya. Prosesnya dilakukan dengan hati-hati. Palm Island di Dubai telah melakukan lebih dari 100 studi sebelum memulai projek ini
9.	Reklamasi teluk Jakarta	Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat (liputan 6, April 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sukses, terjadi penolakan masyarakat setempat • Amdal tidak matang
10.	Reklamasi teluk Benoa Denpasar	Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat (CNN Indonesia, program Insigt, 16 September 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sukses, terjadi penolakan Masyarakat adat setempat • Amdal tidak matang

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 di atas didapat sebuah pembelajaran mengapa sebuah reklamasi bisa dikatakan sukses ataupun gagal. Bercermin pada reklamasi yang sukses dari 8 negara di atas maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadikannya sukses:

- a. Sebuah kebijakan negara yang strategis, misalnya pulau mati atau terpencil menjadi pusat pariwisata
- b. Bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dan bertahap (termasuk kajian amdal)
- d. Dikomunikasikan berbagai pihak
- e. Dilakukan oleh tenaga ahli

Berdasarkan 5 hal di atas, bagaimana dengan Indonesia, terutama reklamasi teluk Benoa Bali. Reklamasi teluk Benoa Bali mengalami kendala, disebabkan pihak masyarakat Bali tidak sepatutnya dengan keinginan pemerintah untuk mereklamasi teluk benoa.

Gb 35 : Deklarasi Desa Pakraman Denpasar Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Puluhan Ribu Massa Tumpah Ruah Di Pusat Kota 26 Maret 2016

<http://walhibali.org/deklarasi-des>



Gb 36 :Warga Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali Siap Macet
<http://regional.kompas.com>, Minggu 20 Maret 2016



Berdasarkan analisis penulis kendala proses reklamasi dapat dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2
 ANALISIS KEGAGALAN REKLAMASI TELUK BENOA

SYARAT SUKSES REKLAMASI	Reklamasi teluk Benoa	Keterangan
Kebijakan strategis	Menambah lapangan pekerjaan sarjana yang telah lulus	Kurang strategis, karena dengan reklamasi justru masyarakat nelayan terancam kehilangan mata pencaharian
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Sarjana yang setiap tahun bertambah membutuhkan lapangan pekerjaan	Analisis statistik pemprov
Perencanaan matang dan bertahap	Tahapan amdal oleh beberapa perguruan tinggi yaitu Unair, universitas Udayana	Terlalu sedikit kajian kelayakan yang dilakukan (reklamasi Jepang menggunakan 100 studi amdal)
Dilakukan komunikasi oleh berbagai pihak	Antara masyarakat adat dengan pemprov Bali	Pemerintah pusat harus terjun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat Adat. Hal ini disebabkan pemprov Bali bukan sebagai pengambil keputusan.
Dilakukan oleh tenaga ahli	PT TWBI	Tidak menggunakan Tenaga ahli internasional yang sudah teruji sehingga terhindar dari prasangka

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan reklamasi teluk Benoa memiliki posisi sebagai kebijakan yang kurang strategis mengingat lahan tersebut bukanlah lahan yang kritis dan mati, sehingga masih dalam kondisi yang bisa diperbaiki. *Kedua*, perencanaan berupa survey kelayakan masih kurang dilakukan sehingga menimbulkan banyak keraguan antara layak dan tidak layak untuk direklamasi. *Ketiga*, pemerintah perlu melibatkan tenaga ahli internasional yang berpengalaman sehingga hasil yang akan dicapai meyakinkan. *Keempat*, posisi pemprov Bali bukanlah posisi strategis sebagai pengambil keputusan tentang jadi atau tidaknya reklamasi dijalankan. dengan demikian harus ada upaya pemerintah pusat untuk bertemu langsung dengan masyarakat adat untuk penyelesaian masalah konflik. Hal ini terlihat ketika mangku Pastika sebagai orang nomor satu di Bali mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat (CNN Indonesia 16 September 2018)

A. Analisis strategi komunikasi berdasarkan tujuan

Meski hanya dalam posisi perantara, pemprov Bali dengan segala upaya melakukan strategi komunikasi agar penyelesaian konflik bisa selesai. Adapun upaya sebagai sebuah strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pemprov Bali dalam rangka penyelesaian konflik pada dasarnya bertujuan untuk tiga hal sebagaimana disebutkan oleh R. Wayne Pace, Brent D. Paterson, dan M. Dallas Burnet dalam bukunya, *Techniques for Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas tiga hal, yaitu : (Arifin, 2008)

1. *to secure understanding*
2. *to establish acceptance*
3. *to motivate action*

To secure understanding artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya. Komunikan yang dimaksud di sini tidak lain adalah masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat yang menolak reklamasi pada khususnya. Pihak yang dimaksud antara lain adalah forBali (Forum rakyat Bali) yang dipimpin oleh Wayan Gendo Suardana. Hingga saat ini pendirian Baliho Tolak reformasi semakin bertambah. Pendirian Baliho dilakukan oleh masyarakat adat dan berbagai komunitas. Hal ini dikuatkan bahwa tanggal 25 Agustus 2018, ijin lokasi akan habis dan AMDAL dinyatakan tidak layak. Terdapat 10 pemasangan Baliho yang tersebar di Gianyar, Denpasar dan Badung. Beberapa desa yang terlibat bisa terkena dampak langsung, bisa juga tidak. Desa tersebut antara lain

desa adat Kelan, Jimbaran, Kuta, Forum masyarakat Singapadu Gianyar, desa adat Intaran Sanur, Sidakarya, Kesiman dan Cangu. Di beberapa desa adat tersebut telah terpasang baliho-baliho yang menyuarakan untuk menolak reformasi (forbali.org, akses 28 Agustus 2018)

Adapun pesan dari Pemprov Bali adalah berusaha menanamkan pemahaman bahwa dibutuhkan lapangan pekerjaan yang besar untuk lulusan-lulusan sarjana di Bali diwaktu yang mendatang sebagai konsekuensi dari konsep *projob*, bahwa setiap tahun ada 25 ribu tamatan S1 di Bali ini dari 53 perguruan tinggi setiap tahun. Mereka tentu saja membutuhkan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Namun dengan adanya proyek reklamasi, selain pembangunan proyek itu sendiri maka bisnis pariwisata akan memberikan wadah bagi calon-calon tenaga kerja.

Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai perbedaan persepsi tentang reklamasi antara pemerintah dengan masyarakat antara lain:

TABEL 3
REKLAMASI DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT

Hal	Perspektif Pemerintah	Perspektif masyarakat adat Bali
Jika reklamasi jika dilaksanakan	Tidak mengganggu ekologi	merusak ekologi (Menyebabkan banjir)
	Menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda	Melanggar kearifan lokal (merusak laut)
	Mencegah menyusutnya lahan produktif	Nelayan terancam mata pencahariannya
	Mitigasi bencana Tsunami	Melanggar kesepakatan awal bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi
	Menambah luas hutan jika rencana ini terwujud yaitu dari 800 hektare, dengan 50 persen lahan hasil reklamasi akan dihijaukan	

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

Secara alami, pesatnya laju pembangunan belakangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan. Sebagaimana mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, dalam kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1997-2011, lahan produktif berkurang mencapai 436 hektare atau 0,50 persen tiap tahunnya. Pada tahun 1997, lahan produktif di Bali tercatat 87.849 hektare dan pada tahun

2011 tercatat 81.744 hektare. Melihat pesatnya pembangunan dalam dua tahun terakhir, data tersebut kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang.

Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam menjaga perkembangan pembangunan pariwisata agar sejalan dengan kelestarian pertanian sebagai nafas kebudayaan Bali. Menurutnya, reklamasi bisa menjadi satu alternatif untuk mencegah makin menyusutnya lahan produktif.

Namun, tujuan strategi komunikasi tersebut baru berhenti sampai *to secure understanding* belum sampai pada *to secure established* dan *to motivated action*. Respon yang negatif dari sebagian masyarakat Bali membuat persoalan ini tidak kunjung selesai. Adapun perbedaan pendapat dari keduanya meliputi bahwa wilayah teluk Benoa adalah wilayah konservasi plus dan sudah ditetapkan sebagai wilayah suci oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia berdasarkan paruman pandita atau rapatnya pendeta majelis tertinggi. Secara perspektif kearifan lokal, ada karakter masyarakat lokal Bali yang memiliki tiga keyakinan mendasar, antara lain adanya beberapa tempat yang mereka anggap suci: tempat suci yang terdiri tidak hanya pure, masjid, gereja, dan apapun itu tempat ibadah harus disucikan; gunung, dan laut.

Teluk Benoa adalah kawasan suci yang tidak boleh dilakukan upaya-upaya pengurukan karena Teluk itu mempunyai energi yang suci. Di sini ada banyak pura, daratan pasang surut yang diyakini sebagai umat Hindu disebut muntik. Masing-masing pihak merasa memiliki dasar yang kuat tentang amdal untuk boleh tidaknya teluk tersebut direklamasi.

Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut menyebabkan Pemprov Bali untuk terus menerus melakukan kajian melalui berbagai saluran komunikasi diantaranya simakrama, Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB2AS), dan paguyuban antar agama. Simakrama sebagai sebuah ajang komunikasi yang melibatkan gubernur dengan masyarakat luas untuk membicarakan persoalan-persoalan seputar Bali, diadakan setiap bulan. Sampai Juli 2018 Simakrama sudah diselenggarakan selama 98 kali. Pemberitaan pro kontra reklamasi sudah juga mendapatkan tempat beberapa kali dalam simakrama. Misalnya saja Simakrama Gubernur Bali ke- 84 yang digelar di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jl. Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar, Sabtu 29 Oktober 2017. Simakrama ini yang meminta ketegasan dari Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan yang terkait reklamasi Teluk Benoa. Di bagian akhir simakrama, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Jero Gede Suwena Upadesa, menyampaikan tentang pentingnya peran Desa Pekraman yang ada di Bali dalam menjaga adat, budaya dan tradisi dari masyarakat Bali dan mengajak masyarakat Bali untuk

selalu menyelesaikan permasalahan dengan memegang slogan kearifan lokal *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh*.

Terkait masalah kejelasan kelanjutan tentang reklamasi Teluk Benoa, Pastika mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat ke Menteri kehutanan dan lingkungan Hidup. Tidak berhenti sampai di sana Pastika juga ia juga menyusulkan surat kedua dengan tembusan kepada Menteri Kemaritiman dan Menteri kelautan. Pastika menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Namun demikian penyampaian aspirasi masyarakat Bali tetap disampaikan.

Podium Bebas Bicara Apa Saja (PB2AS) bertujuan untuk memberi ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau para pendemo ada di ruang publik yang tidak sampai mengganggu lalu lintas. Pemprov Bali menyediakan sebuah mimbar kecil dengan pengeras suara yang hanya dibuka setiap Minggu pagi mulai pukul 8.00 sd 10.00. setiap orang, warga Balai boleh berbicara apa saja yang ia keluhkan dan ingin disampaikan.

Selain itu terdapat pula forum kerukunan antar umat beragama yang juga sangat membantu pemerintah provinsi Bali untuk menjaga rasa toleransi rasa keharmonisan untuk mencapai suasana Bali bisa aman. Ada pula paguyuban - paguyuban yang didalamnya akan dikomunikasikan segala sesuatu untuk kepentingan Bali. Beberapa nama paguyuban antara lain yang namanya “Pasundan”, di Sumatera Barat : “Minang Saiyo.” Sebagaimana masyarakat Bali, mereka juga sering melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif setiap bulan. Dengan demikian setiap pesan-pesan kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan melalui pertemuan mereka. Kegiatan rembug-rembug atau musyawarah tetap dilakukan dari pihak pemerintah ketika menginginkan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menentukan tokoh-tokohnya walaupun tidak selalu ada kesepakatan dalam diskusi. Tetapi pada prinsipnya pemerintah provinsi Bali pada akhirnya tetap pada posisi yang seharusnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemprov merasa berkewajiban menindaklanjuti perpres, namun di sisi lain masyarakat Bali menginginkan yang terbaik bagi tempat tinggalnya.

Dengan melihat upaya pemprov dalam membuka saluran komunikasi, setidaknya komunikasi menjadi transparan dan masing-masing pihak menjadi jelas tentang apa yang diperselisihkan. Namun demikian, mengingat posisi pemprov adalah di tengah antara pemerintah pusat dan masyarakat Bali, maka idealnya dalam simakrama dipertemukan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Bali untuk kepastian eksekusi reklamasi. Hal ini terlihat

bahwa Gubernur mangku pastika menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat tentang masalah ini.

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi komunikasi diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor pendukung atau penghambat pada setiap komponen, diantaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi komunikasi adalah banyaknya forum komunikasi yang digelar pemprov Bali untuk menyamakan persepsi. Sedangkan faktor penghambat adalah kearifan lokal masyarakat Bali yang diyakini dan tidak boleh dilanggar, posisi pemprov Bali sebagai perantara bukan eksekusi, sehingga pemprov bukanlah pengambil keputusan.

Tujuan merupakan hal pertama yang harus dirumuskan dalam sebuah perencanaan strategi komunikasi. Tujuan strategi yang dilakukan pemprov sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu menginformasikan tentang pentingnya reklamasi teluk Benoa. Sisi positif dan manfaat reklamasi dipaparkan secara jelas oleh pemprov. Hal tersebut dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. Tujuan strategi pemprov tidak dilakukan secara tertulis, namun tujuan itu muncul karena dikaitkan dengan kebutuhan di masa mendatang yaitu kebutuhan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

B. Analisis strategi komunikasi berdasarkan prinsip

Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan strategi komunikasi, yaitu prinsip partisipatif, prinsip kesinambungan, dan prinsip holistik.

- 1) Prinsip partisipatif ialah sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.
- 2) Prinsip kesinambungan ialah sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

- 3) Prinsip holistik artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan.

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, Pemprov Bali melakukan strategi komunikasi dengan prinsip partisipatif. Dalam prinsip partisipatif, Pemprov membuka rembug-rembug yang melibatkan stakeholder, baik itu masyarakat Bali, pengembang, maupun dunia perguruan tinggi. Namun ada satu stakeholder yang justru menentukan, tetapi tidak dilibatkan yaitu pemerintah pusat. Komunikasi dilakukan melalui acara-acara di Simakrama, PB2AS, maupun paguyuban-paguyuban. Kerjasama dan komunikasi juga dilakukan dengan dunia civitas akademika yaitu universitas Airlangga dan Udayana dalam rangka survey AMDAL. Di sisi lain pihak WALHI sebagai kontra reklamasi juga ikut dirangkul untuk mencapai titik tengah. Satu hal yang menarik ketika pihak penelitian yang dilakukan akademisi berkesimpulan untuk mengatkan tidak layak untuk direklamasi. Sementara Pemerintah pusat belum juga mencabut perpres No 51 tahun 2014. Dilihat dari sisi netralitas, tentu pihak akademisi tidak memiliki kepentingan apapun untuk reklamasi ini, namun sampai saat ini perjalanan pro dan kontra tidak kunjung selesai.

Terkait dengan prinsip partisipatif maka ada 3 pendekatan dalam strategi komunikasi menurut Berger (Griffin, 2006) yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Diantara ketiga pendekatan tersebut maka pendekatan interaktif adalah pendekatan yang mengandung nilai-nilai humanis dan budaya baru yang kemudian pada gilirannya mampu mengubah *mind-set* masyarakat tentang pembangunan. Pendekatan ini lebih mengedepankan pada proses pendidikan masyarakat agar memiliki kesadaran. Kesadaran ini yang kemudian dapat digunakan untuk menghindari konfrontasi politik serta menjamin ketersediaan berbagai alternatif untuk memformulasikan dan mengorganisasikan permasalahan yang dialami masyarakat secara lebih baik. Selain itu dapat pula memunculkan kekuatan *indigenous knowledge* dan *skill* dalam proses pencarian solusi berbagai masalah lokal yang timbul.

Komunikasi partisipatoris dalam pembangunan merupakan instrumen untuk menghasilkan partisipasi masyarakat. Setidaknya ada 4 dimensi dalam komunikasi partisipasi:

- 1) Proses rekayasa sosial melalui pembelajaran bagi individu dan masyarakat. Pembelajaran ini dapat meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas.

- 2) Partnership; bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi mitra yang sejajar
- 3) Tanggung jawab individu
- 4) Nilai-nilai yang ada di sekitarnya.

Oleh karenanya melalui komunikasi yang partisipatoris ini perubahan yang terjadi tidak hanya pada level kognisi tetapi juga pada sikap, perilaku dan skill pada individu. Pendekatan partisipatoris sudah dilakukan oleh pemprov Bali meskipun belum semua langkah terlaksana. Proses pembelajaran atau disebut dengan pendidikan adalah upaya untuk menuju kepada perubahan. Pendidikan yang dimaksud adalah mengajak kepada perubahan *mind set* bahwa reklamasi teluk Benoa memiliki manfaat atau berdampak positif bagi masa depan Bali. Hadirnya bisnis pariwisata membuat ribuan tenaga kerja tersalurkan sehingga slogan Bali Mandara dapat terwujud. Pada dimensi yang kedua yaitu partnership, pemprov Bali berusaha untuk menjadi mitra bagi siapapun masyarakat yang ingin berkomunikasi. Kedudukan sebagai mitra terlihat dengan upaya komunikasi yang terus dilakukan pemprov dengan pihak-pihak yang kontra. Namun demikian sekali lagi bahwa posisi pemprov adalah perantara, bukan pengambil keputusan. Dengan demikian posisi strategis harus diambil oleh pemerintah pusat. Merekalah yang harus intens berkomunikasi dengan pihak masyarakat yang menolak reklamasi dan ini belum dilakukan. Dimensi yang ketiga tentang tanggung jawab individu sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak baik pemprov maupun masyarakat setempat melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan pihak lain seperti komnas HAM melakukan langkah-langkah penanganan. Hal pertama yang dicari pihak Komnas HAM adalah, apakah ada degradasi terhadap kehidupan masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya kalau nantinya dilakukan reklamasi. Apakah ada potensi degradasi terhadap lingkungan alam akibat reklamasi dan apakah ada potensi terjadinya intimidasi terhadap kelompok yang kontra reklamasi. Untuk permasalahan-permasalahan tersebut dibuka forum-forum konsultasi agar didapat informasi-informasi yang jelas yang nantinya bisa divalidasi untuk dijadikan data referensi. Hal utama yang diinginkan Komnas HAM adalah mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan antar kelompok yang nantinya bisa menimbulkan konflik-konflik horisontal. Komnas HAM bisa menjadi mediator dan mencari solusi, dengan melakukan pembahasan secara transparan dan jernih terlepas unsur-unsur politik demi kebaikan masyarakat Bali.

Adapun untuk nilai-nilai yang dianut masyarakat Bali juga tidak ditinggalkan begitu saja. Nilai-nilai mereka pada dasarnya berasal dari agama yang dianut, yaitu Hindhu. Munculnya Tri Hita Karana, *tat twam si* dan sebagainya justeru menjadi penguat bahwa laut

harus diselamatkan dan tidak boleh dijamah reklamasi disamping dari sisi amdal sementara ini belum juga mengijinkan.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan partisipasi (Dusseldorp dalam Mardikanto, 1993) antara lain:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri dalam diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakatnya.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemprov Bali terdapat pada poin satu sampai dengan enam. Pelibatan diskusi sampai dengan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan. Hanya saja pada poin 6 pemanfaatan hasil yang dicapai masih sebatas pada hasil diskusi yang dilaporkan kepada pemerintah pusat. Sebab diskusi dalam mencapai kesepakatan belum terwujud. Dengan demikian untuk partisipasi pada poin 6 belum berjalan dengan maksimal.

Arnstein (dalam Haryono. 2005:51) memperkenalkan 8 tangga pendekatan partisipatif yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk kegiatan besar yaitu:

- 1) Tingkat non partisipasi yang berbentuk manipulasi dan terapi. Dalam bentuk yang pertama ini masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan atau mengarahkan program; sedangkan pemerintah aktif dalam mengolah dan mendidik partisipasi masyarakat.
- 2) Tingkatan *tokenism* (petanda/symbol). Tingkatan ini meliputi *information consultation* dan *placation*. Antara masyarakat dan pemerintah terlibat dialog secara aktif namun dalam hal pengambilan kebijakan akan tetapi tetap yang memiliki peran adalah pemerintah. Biasanya bentuk komunikasi yang dipakai adalah komunikasi satu arah yang didominasi oleh pemerintah komunikasi dua arah dan komunikasi bersama-sama.
- 3) *Citizen power*. Tingkatan ini meliputi *partnership*; *delegated control*; dan *citizen control*. *Partnership* merupakan kesejajaran antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. *Delegated control* artinya pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kebutuhannya.

Citizen control adalah masyarakat memilih kekuasaan atas kebijakan publik baik dalam perumusan, implementasi hingga evaluasi kontrol.

Berdasarkan 3 bentuk partisipasi di atas maka kasus penyelesaian reklamasi oleh Pemprov Bali menggunakan bentuk yang kedua, yaitu *tokenism* (petanda/ simbol). Antara masyarakat dan pemerintah terlibat dialog secara aktif namun dalam hal pengambilan kebijakan akan tetapi tetap yang memiliki peran adalah pemerintah. Bentuk komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi dua arah dalam forum diskusi bersama seperti *simakrama* dan *PB2AS*. Sekali lagi bahwa yang dimaksud pemerintah di sini sebenarnya pemerintah pusat yaitu pemerintah yang telah menetapkan *perpres 51 tahun 2014*. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah yang selalu mengadakan komunikasi dengan masyarakat adalah pemerintah daerah Bali yang notabene bukan pengambil keputusan. Hal inilah yang menyebabkan strategi komunikasi yang dijalankan belum berlangsung secara efektif meskipun menggunakan pendekatan partisipatif.

C. Analisis komunikasi berdasarkan metode

Menurut cara pelaksanaannya metode komunikasi diwujudkan dalam bentuk :

a. Metode *redudancy*, yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang pesan kepada khalayak, sehingga pesan yang diulang akan menarik perhatian. Komunikator juga dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam penyampaian sebelumnya.

b. Metode *Canalizing*, pada metode ini, komunikator terlebih dahulu mengenal khalayaknya dan mulai menyampaikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap dan motif khalayak. Sedangkan menurut bentuk isinya metode komunikasi diwujudkan dalam bentuk :

a. Metode *Informatif*, dalam dunia publisistik atau komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula.

b. Metode *Edukatif*, diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi pendapat, fakta dan pengalaman yang merupakan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian isi pesan disusun secara teratur dan berencana dengan tujuan mengubah perilaku khalayak.

c. Metode *Koersif*, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa, dalam hal ini khalayak dipaksa untuk menerima gagasan atau ide oleh karena itu pesan dari komunikasi ini selain berisi pendapat juga berisi ancaman.

d. Metode *Persuasif*, merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikan, dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis, bahkan kalau dapat khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar.

Berdasarkan analisis metode komunikasi maka pemprov Bali menggunakan metode informatif dan persuasif. Mengapa demikian, hal ini disebabkan pemprov masih sebatas hanya menginformasikan tentang kondisi teluk Benoa yang sekarang terjadi serta berupaya untuk mengajak masyarakat terutama masyarakat yang kontra untuk mematuhi perpres 51 tahun 2014, sehingga reklamasi dapat segera diwujudkan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Namun ajakan ini sampai sekarang belum menemui titik temu sebab pihak yang diajak masih merasa benar dengan pendapatnya. Meski bujukan disertai iming-iming, tetapi pihak masyarakat Bali juga memiliki argumen yang kuat.

D. Analisis penggunaan pesan dalam strategi komunikasi pemprov Bali

Wilbur Schramm mengatakan dalam syarat-syarat berhasilnya pesan adalah sebagai berikut (Fajar, 2009) :

1. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju
2. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada kedua pengertian itu bertemu.
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi dari sasaran dan menyarankan cara-cara mencapai kebutuhan itu.
4. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana kesadaran pada saat digerakan untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki.

Samovar dan Porter juga tertarik untuk menyatakan tentang efektivitas sebuah pesan baik dalam penggunaan kode verbal dan non verbal yang diketahui bersama (Liliweri 2001) Beberapa strategi penggunaan pesan antara lain melibatkan beberapa hal:

1. Tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan tentang orang lain.
2. Mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan.
3. Memberikan kesempatan pada pihak lain untuk memberikan *feedback*.
4. Mengembangkan empati atas dasar asumsi adanya perbedaan.

Berdasarkan pendapat dari Samover dan Porter tentang efektivitas sebuah pesan, maka pesan ajakan yang disampaikan oleh pemprov Bali belum dapat dikatakan efektif proses menuju kesana belum selesai. Agar lebih jelas, bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4
EFEKTIVITAS PESAN PERSUASIF

Indikator	implementasi
Tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan tentang orang lain	Dalam hal ini pemprov menyatakan bahwa Walhi sebagai pihak kontra bukan dianggap musuh tetapi dianggap sebagai partner yang memberi masukan terhadap analisis lingkungan
Mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan.	Dengan penolakan yang dilakukan 38 desa adat, maka upaya terus untuk berkomunikasi secara persuasif dilakukan tanpa upaya memaksa
Memberikan kesempatan pada pihak lain untuk memberikan <i>feedback</i> .	Rembug-rembug melalui berbagai forum komunikasi menandakan bahwa pemprov terbuka terhadap masukan dan kritikan
Mengembangkan empati atas dasar asumsi adanya perbedaan.	Sebagai provinsi yang menaungi wilayah teluk Benoa berupaya untuk tidak menafikan masyarakatnya sehingga Gubernur menyatakan bahwa pemerintah pusatlah yang seharusnya turun tangan.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

Berdasarkan analisis pesan pemprov Bali terlihat bahwa pesan sudah bisa dikatakan efektif untuk mengajak semua elemen masyarakat dalam menyukseskan reklamasi teluk Benoa.

E. Langkah-langkah pemprov dalam mencapai efektivitas strategi komunikasi

Hal ini dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. *Kedua*, memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa. *Ketiga*, konsentrasi, yaitu dilakukan dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan. *Keempat*, fleksibilitas, yaitu bahwa sebuah strategi diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi fleksibilitas. *Kelima*, kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. *Keenam*, kejujuran, bahwa sebuah strategi

dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat tidak terduga. *Ketujuh*, keamanan, bahwa sebuah strategi mesti mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi.

TABEL 5
EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI

Indikator	Implementasi oleh pemprov
tujuan yang jelas	Mengajak seluruh masyarakat Bali untuk setuju dengan proyek reklamasi teluk Benoa sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam perpres 51 tahun 2014
memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa	Pemprov masih memiliki komitmen untuk membuat Bali aman dari ancaman yang berasal dalam maupun luar sehingga komunikasi demi komunikasi masih terus dilakukan untuk menuju keharmonisan
konsentrasi, yaitu dilakukan dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan	Pemprov konsentrasi pada kekuatan for Bali yang bertahan untuk menolak reklamasi sehingga beberapa kali undangan disampaikan kepada ketua untuk duduk bersama
fleksibilitas, yaitu bahwa sebuah strategi diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi fleksibilitas	Pemprov juga menyatakan bahwa jika reklamasi tidak disetujui/ditolak juga akan disampaikan sebagaimana adanya karena pemprov bukanlah pengambil keputusan
kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi	Meski berposisi sebagai perantara, gubernur melarang untuk melakukan demonstrasi yang agresif dan tidak santun kepada pemerintah pusat, sebab koordinator ada di Jakarta. Semua harus melalui prosedur yang benar
kejujuran, bahwa sebuah strategi dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat tidak terduga	Data-data amdal sebagai bentuk dari kecerdasan masih sangat minimalis. Kajian kelayakan dari dunia akademisi menyatakan tidak layak sehingga masih memerlukan banyak sekali kajian
keamanan, bahwa sebuah strategi mesti mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi.	pihak kontra tidak boleh melakukan tindakan di luar koridor hukum sehingga perlu terus menerus diajak berkomunikasi sampai pada titik jenuh. Dengan demikian slogan Bali Mandara (Bali Aman, damai, dan Sejahtera) benar-benar akan terwujud.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa strategi komunikasi yang dilakukan pemprov belum terbilang belum efektif mengingat banyak persoalan yang mengganjal yaitu posisi pemprov bukanlah posisi kunci, kekuatan pengaruh kearifan lokal, dan perencanaan amdal yang tidak matang.

F. Langkah-langkah pemprov Bali dalam pelaksanaan strategi komunikasi

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan pemprov Bali dalam menyelesaikan kasus penolakan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Membuka saluran komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat

Saluran komunikasi adalah wadah tempat berlangsungnya komunikasi antara kedua belah pihak yaitu pemprov dan masyarakat bali. Beberapa wadah yang bisa dibuat untuk fasilitas komunikasi antara lain:

- Simakrama
- Forum bebas bicara apa saja (FP2AS)
- forum kerukunan antar umat beragama
- paguyuban-paguyuban daerah

2. Memfungsikan opinion leader

Lembaga adat yang ada di Bali juga ada stratanya seperti pemerintahan dinas. Jadi, desa adat yang ada di tingkat desa dipimpin oleh tetua desa adat. Tetua adat itu punya atasan lagi dia di tingkat kecamatan dan kabupaten disebut tetua madian terus di tingkat kabupatennya juga ada. Kalau di tingkat provinsi namanya tetua adat utama. Jadi pendekatannya adalah melalui struktur ini. dulu pada akhirnya kita bertemunya di tingkat desa. Beberapa kali diadakan pertemuan baik dari pihak pemerintah dengan struktur desa adat. Memang ucapan tetua yang didengar itu adalah memang tetua yang di tingkat desanya apapun kata mereka.

Struktur kelembagaan desa di Bali terdiri dari desa dinas dan desa adat. Desa dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa seperti permohonan kartu identitas kartu keluarga dan sebagainya. Desa dinas berada di bawah kecamatan. Sedangkan pemerintahan desa adat atau Pakraman di pulau bali terdiri dari tiga tingkatan yaitu 1 desa adat agung (tingkat provinsi) 9 desa adat madya (tingkat kabupaten) dan 700 desa pakraman (tingkat desa). Tugas utama

pemerintah desa adat adalah menangani kegiatan budaya agama dan isu sosial. Misalnya ketika sebuah keluarga akan melakukan upacara pernikahan atau penduduk desa akan mengadakan upacara keagamaan di pura desa maka pemimpin desa adat (kelihan adat) akan menanganinya. Dalam menjalankan tugasnya Kelihan adat dan bawahannya harus berdasarkan pada aturan adat-istiadat setempat baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis (*awig-awig*). Kelihan adat tidak digaji tetapi “ngayah” artinya bekerja dan melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Semua dilakukan dengan suka rela. Namun demikian pemprov telah mengalokasikan sejumlah dana untuk kelihan adat yaitu 700 ribu sd 1.500.000 (diedit.com akses 18 Agustus 2018).

Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara informal. Mereka memiliki pengaruh yang besar pandangan atau pendapat dari orang-orang yang berada di kelompoknya (Hanafi dalam Kunto, 2010). Dengan demikian Kelihan adat menjadi rujukan penapatnya bagi masyarakat yang memilihnya.

Karakteristik opinion leader (Nurudin, 2010), pada umumnya memiliki kompetensi tertentu yang melampaui anggotanya. Biasanya mereka memiliki ciri-ciri sebagaimana di bawah ini:

- a. Lebih tinggi pendidikan formal daripada anggotanya
- b. Lebih tinggi status sosial dan status ekonomi
- c. Lebih inovatif dalam mengadopsi ide baru
- d. Lebih tinggi pengenalan medianya
- e. Kemampuan empati yang lebih besar
- f. Partisipasi sosial lebih besar

Bagi kelihan adat di Bali enam syarat di atas tidak terpenuhi semuanya bagi para tetua adat di pemprov Bali. Pemilihan kelihan adat di Bali bukan berdasarkan pada status sosial ekonomi, namun lebih pada kepercayaan masyarakat kepada yang bersangkutan karena partisipasi dan empati besar dalam masyarakat meskipun bisa dikatakan bahwa mereka tidak menerima gaji.

3. Memfungsikan kearifan lokal

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi

harmonisasi. Beberapa bentuk kearifan lokal yang mengarah pada keharmonisan antara lain:

1. Pakaian “udeng”. Pakaian ini mengandung filosofi yang bijak dalam mengendalikan perilaku manusia. Pakaian ini juga berperan dalam ketika manusia berinteraksi dengan orang lain. Pendemo dipantau langsung oleh desa adat mereka dengan pakaian. Udeng bertujuan untuk mengikatkan pikiran supaya tidak liar. Dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Pakaian akan memfokuskan pada sesuatu hal yang memang tujuan utama supaya tidak bias. Jika emosi dibiarkan dengan leluasa kadang-kadang emosional mereka itu tidak terkendali apalagi kalau masyarakat sudah berkumpul susah dikendalikan. Tapi dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekankan untuk fokus dalam pikiran.
2. Dalam konsep Tri Hita Karana, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara tertentu mencerminkan hal bagaimana kita menghargai lingkungan. Ada yang namanya tumpeg udong, tumpeg tanaman, ada namanya tumpeg landak. Hal ini adalah contoh yang diyakini masyarakat agar masyarakat tetap menjaga lingkungan agar lestari. Adapun yang kedua adalah bagaimana menghargai sesama. Saling menghormati sesama. Ketiga adalah bagaimana menghormati Tuhan. Tiga hal inilah yang menyebabkan manusia akan hidup bahagia. Konsep Tri Hita Karana itu sendiri berarti tiga kebaikan atau tiga kebahagiaan. Norma susila ini dirangkum dalam tiga kata yaitu parhyangan, pawongan dan palemahan. Pada saat ini masyarakat Bali disinyalir sudah banyak melanggar norma susila yang kedua yaitu pawongan (hubungan harmonis kepada sesama manusia). Akibatnya adanya kesengsaraan, konflik, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Dengan tetap menjaga pawongan maka demonstrasi yang agresif dan tidak santun bisa dihindarkan kerana pada dasarnya “pawongan” menghendaki adanya keharmonisan hubungan antar manusia.
3. Tat Twam Asi itu adalah hidup bertoleransi antar kita. Intinya “Aku adalah kamu, kamu adalah aku”, sehingga kita dapat merasakan persaudaraan diantara kita walaupun mereka datang dari Sumatera, Kalimantan, Irian, Jawa. Jadi dengan prinsip Tat Twam Asi itulah yang membuat kita bisa hidup satu tanah di Bali untuk menjadi keharmonisan tapi yang berkaitan dengan reklamasi tentunya Tat Twam Asi itulah yang menjadi kata kunci.

4. Slogan *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paras sarpanaya, saling asah-asih dan asuh*. Slogan ini memiliki arti bersatu padu dalam suka duka dan menghadapi bahaya berembug dan bermusyawah (menghargai pendapat orang lain), saling menyayangi, saling mengingatkan dan saling menolong. Slogan ini adalah turunan dari Tri Hita Karana yang kedua yaitu pawongan yaitu hubungan harmonis sesama manusia.

Bentuk kearifan lokal masyarakat Bali erat kaitannya dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai agama Hindhu. Salah satu ciri *local genius* adalah biasanya sangat terkait dengan sistem kepercayaan (Al Wasilah, 2009). Beberapa bentuk kearifan lokal di Bali adalah hasil dari nilai-nilai agama Hindhu sebagai mayoritas kepercayaan yang diamut oleh masyarakat Bali. Beberapa penelitian antropologis menyatakan bahwa orang Bali dikenal sebagai orang yang berbeda pekerti baik karena keyakinan dan kepercayaan serta melaksanakan ajaran agama Hindhu-Bali dengan baik, berjiwa halus dengan budaya kesenian yang tinggi ramah-tamah, toleran, rendah hati suka gotong royong dan sebagainya. Agama orang Bali bersumber pada agama tirta yang menginduk pada agama Hindhu dari sekte waisnawa. Salah satu norma susila itulah yang kini disebut dengan konsep Tri Hita Karana.

Tersebutlah desa tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem. Desa ini sangat dekat dengan Panti Candi dasa. Keunikan desa ini adalah ketatnya masyarakat setempat dalam melindungi dan melestarikan hutan adat. Mereka memiliki hukum adat (*awig-awig*) yang mengatur pengelolaan hutan termasuk pelarangan menebang pohon. Adapun desa Panglipuran memiliki tata desa yang bergitu rapi dan cantik. Rumah diatur dengan seragam berpagar sama dan berpintu sama. Jalan utama menanjak ke atas dan membagi desa menjadi 3 bagian sesuai dengan konsep Tri Hita Karana (hibungan manusia dengan Tuhan; manusia dengan manusia; dan manusia dengan alam semesta) (kompas. com 19 Agustus 2018)

Ada berbagai tantangan dalam eksistensi kearifan lokal. Dalam hal pengelolaan sumber daya air dalam perkembangan dan perjalanannya sering tatanan air menghadapi banyak tantangan sehingga mempengaruhi eksistensinya. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam sekitarnya; kegiatan pembangunan dan modernisasi (Hidayati.2016). Proyek reklamasi teluk Benoa yang selama ini diperjuangkan oleh pemerintah jelas mendapatkan hambatan dari kearifan lokal masyarakat Bali itu sendiri. Mereka menyucikan laut sebagai cermin dari Hita Karana yang ketiga yaitu harmonisasi hubungan manusia dengan alam. Oleh karenanya siapapun tidak boleh menyentuh laut.

Kegiatan reklamasi dianggap penduduk setempat akan merusak laut mereka yang selama ini digunakan sebagai sarana ibadah.

5. Melakukan perencanaan berupa studi kelayakan dengan dunia akademisi

Studi kelayakan merupakan bagian dari perencanaan komunikasi yaitu analisis situasi. Sebuah perencanaan komunikasi mutlak dilakukan dalam sebuah strategi komunikasi. Sebagai contoh sebuah perencanaan komunikasi yang matang dilakukan Jepang ketika melakukan reklamasi Osaka. Jepang berhasil melakukan revitalisasi Osaka dan menaikkan taraf perekonomian warga sekitarnya. Prosesnya dilakukan dengan hati-hati. Palm Island di Dubai telah melakukan lebih dari 100 studi sebelum memulai proyek ini. Dengan berkaca pada keberhasilan Jepang maka bisa dikatakan bahwa studi kelayakan yang dilakukan dalam reklamasi Teluk Benoa masih sangat sedikit terlebih bahwa studi kelayakan yang dilakukan oleh semua dunia akademisi menyatakan tidak layak untuk direklamasi.

UNESCO membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi, yakni: (Cangara. 2013:67)

1. Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi, apakah itu dioperasikan oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi antara pemerintah dan swasta.
2. Melakukan analisis tentang struktur dan sumber daya komunikasi yang ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta media media apa saja yang ada dalam masyarakat.
3. Melakukan analisis kritis terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap komunikasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, apakah hiburan, pendapat, atau berita.
4. Melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai dari sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan umpan balik dari masyarakat.
5. Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah komunikasi mengalami kemajuan dalam hal jumlah (tiras), sebaran, atau peringkat dalam tayangannya.
6. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebijaksanaan komunikasi yang ada.

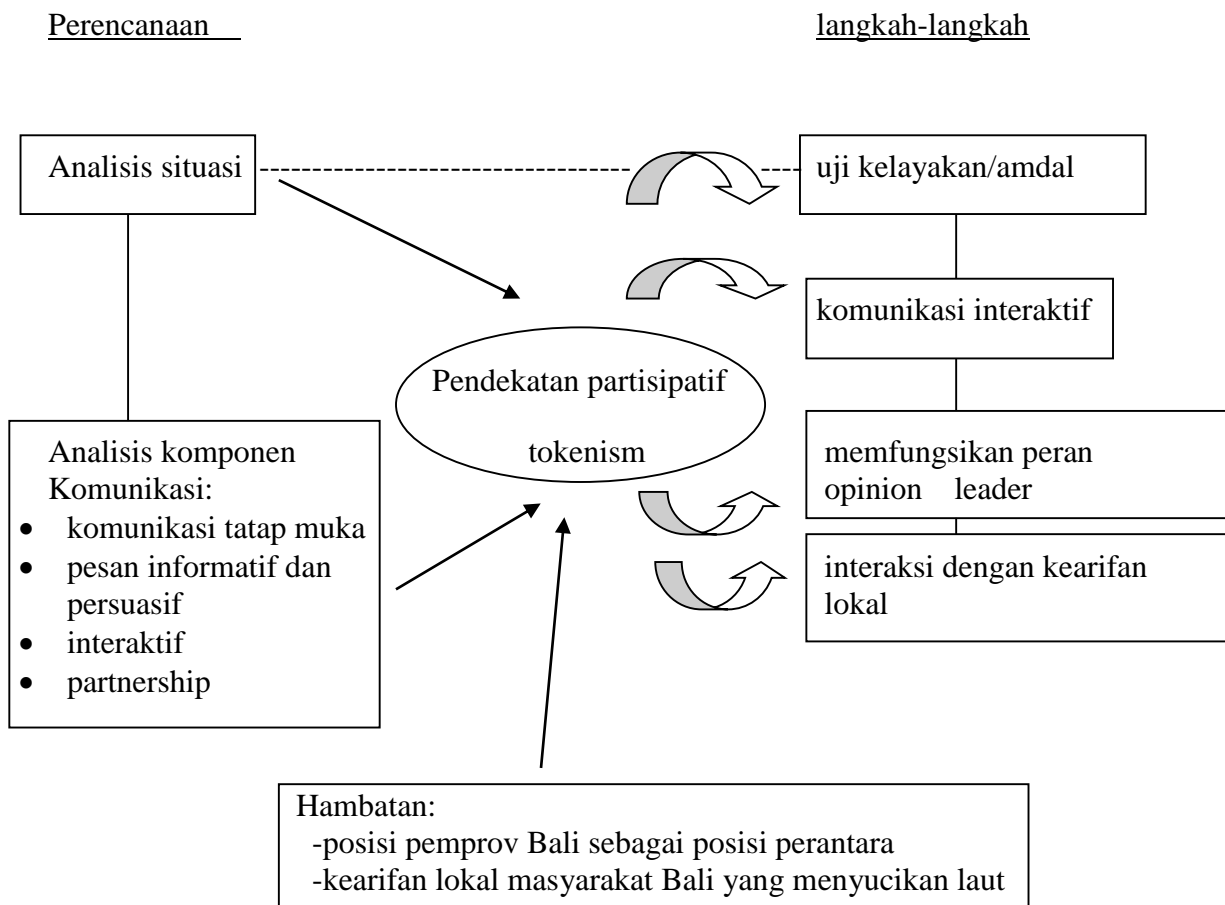
Perencanaan yang dilakukan oleh pemprov Bali dalam penyelesaian konflik reklamasi teluk Benoa Bali mencakup studi kelayakan bersama dunia akademisi. Analisis tentang

sumber daya komunikasi sebagaimana yang dimaksud Cangara di atas menjelaskan bahwa perlunya melihat komponen-komponen komunikasi mulai dari komunikator, media, pesan sampai dengan penerima. Dalam perspektif sumber daya komunikasi atau komunikator, pemprov menetapkan bahwa komunikator yang sebenarnya adalah pemerintah pusat berdasarkan munculnya perpres 51 tahun 2014. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan jadi tidaknya reklamasi kepada pemerintah pusat. Dalam analisis media, pemprov lebih banyak menggunakan media tatap muka dalam kelompok besar atau komunikasi publik. Dengan dibukanya forum simakrama, diharapkan keluhan masyarakat dapat tersalurkan.

Dalam hal analisis komunikasi, pemprov menyatakan bahwa para anggota masyarakat yang menolak kebijakan reklamasi adalah partner yang harus terus digandeng dan ditanggapi dalam komunikasinya. Dengan demikian pemprov merasa bahwa dirinya menjadi bagian yang penting dalam menentukan sebuah kebijakan.

Dengan demikian model strategi komunikasi pemprov Bali dalam penyelesaian konflik reklamasi teluk Benoa dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1: Strategi komunikasi Pemprov Bali



BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam menjalankan strategi komunikasi dalam penyelesaian penolakan reklamasi teluk Benoa, pemprov Bali melakukan pendekatan partisipatif tokenism yang berarti antara masyarakat dan pemerintah terlibat dialog secara aktif namun dalam hal pengambilan kebijakan akan tetapi tetap yang memiliki peran adalah pemerintah. Pesan yang disampaikan bersifat persuasif dan informatif. Pemprov melakukan perencanaan komunikasi berupa analisis situasi/ amdal yang dilakukan dengan beberapa Perguruan tinggi di Indonesia. Namun hasil survey dari dunia akademisi menyatakan bahwa Teluk Benoa tidak layak untuk direklamasi karena bisa mengganggu ekologi. Adapun posisi pemprov Bali sebagai perantara dan bukan pengambil keputusan adalah faktor yang menghambat efektivitas strategi komunikasi selain keberadaan kearifan lokal. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemprov Bali dalam strateginya antara lain:

1. Membuka saluran komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Hal ini dilakukan melalui simakrama, Forum bebas bicara apa saja (FP2AS), forum kerukunan antar umat beragama, dan paguyuban-paguyuban daerah.

2. Memfungsikan peran opinion leader

Mereka adalah para kelihan adat di Bali/pimpinan masyarakat adat yang dipilih karena tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kemasyarakatan dan kemampuan empati yang besar.

3. Berinteraksi dengan kearifan lokal

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi harmonisasi. Beberapa bentuk kearifan lokal yang mengarah pada keharmonisan antara lain: *Pertama*, pakaian “udeng” dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekankan untuk mengikatkan pikiran untuk fokus. *Kedua*, konsep Tri Hita Karana, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara adat tertentu mencerminkan hal bagaimana menghargai lingkungan. *Ketiga*, Tat Twam Asi itu dengan prinsip Tat Twam Asi itulah yang membuat masyarakat Bali bisa hidup satu tanah di Bali untuk menjadi keharmonisan tapi yang berkaitan dengan reklamasi. *Keempat*, slogan *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan*

asuh. Bentuk-bentuk kearifan lokal Bali tersebut bersumber dari nilai-nilai agama Hindhu.

4. Melakukan studi kelayakan amdal dengan dunia akademisi

Studi kelayakan merupakan bagian dari perencanaan komunikasi yaitu analisis situasi. Namun demikian, amdal yang dilakukan kurang dalam kuantitas dan kualitas. Tidak lebih dari 10 amdal yang baru dijalankan oleh pemerintah. Padahal ketika berkaca dari Jepang, amdal dilakukan sampai ratusan penelitian kelayakan sehingga hasilnya menjadi sangat maksimal.

- Implikasi

- a. Diharapkan pemerintah pusat turun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat Bali dan bertindak tegas tentang keputusan yang akan diambil.
- b. Pemerintah membuat perencanaan yang jelas dan matang termasuk *time scheduling* sehingga persoalan tidak berlarut-larut.
- c. Kajian tentang amdal sebagai studi kelayakan diperbanyak lagi sampai mencapai titik jenuh.
- d. Menggunakan tenaga ahli yang teruji dengan skala internasional , sebagaimana yang telah dilakukan dalam reklamasi Dubai

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wasilah, 2009, *Ednopedagogis*, Bandung: Kiblat
- Arifin, Anwar. 1994. *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: Armico
- Baron, Roberta A. dan Byrne, Donn, 2004, (terjemahan), *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Erlangga
- Berger Charles 2006, *Uncertainty Reduction Theory*, dalam Griffin, EM, A First Look At Communication, Edisi 6.mc Graw-Hill
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi komunikasi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Dahnke, Gordon L and W Clatterbuck, Glen, 1990, *Human Communication : Theory and Research*, Wadsworth Publishing Company, USA
- Dayakisni dan Hudaniah, 2003, *Psikologi Sosial*, Malang, UMS Press
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Eysenck dan W Arnold, 1972, *Encyclopedia of Psichology*, Volume 1, Herder KG, West Jerman
- Feldman, Robert S., 1985, *Social Psycology, Theories, Research, and Applications*, USA, Mc Graw-Hill
- Gibson, et all, 2003, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*, Boston, Mc Graw Hill
- Greenberg, Jerald dan Baron, Robert A, 1995, *Behaviour in Organization*, Pearson Education Inc, New Jersey, USA
- Little John, Stephen W, 1999, *Theories of Human Communication*, USA, Woodsworth publishing company
- Mardikanto Totok,1993, *Strategi Komunikasi Pembangunan*, Jakarta: Balai pustaka
- Moleong. Lexy, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mujib, Abdul dan Mudakir, Jusuf, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, 2001, Jakarta, Raja
- Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung, Rosdakarya.
- Nurudin, 2010, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Radja grafindo Persada, Jakarta
- Putra, I Dewa Ghede Mahendra.(2017). *Bali Mandara*, Denpasar: Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Rahmat, Jalaluddin, 2008, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remadja Rosdakarya.

_____, 2001, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung, Rosdakarya.

Ruslan, Rusadi, 2002, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT Rajawali Pers

Santosa, Slamet, 1992, *Dinamika Kelompok*, Jakarta, Bumi Aksara

Sills, David L, *International Encyclopedia of Social Sciences*, Volume 1 dan 2, New York, Macmillan Company

Wiana, I Ketut.(2004). *Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehari-Hari Dalam Bali*, Denpasar: Aneka Perpektif.

Jurnal :

Kunto RA, dkk, 2010, *Proses Difusi Teknologi Konservasi lahan Kering melalui Pemuka pendapat (opinion Leader) di Kabupaten Bantul*, Jurnal agritext, no 28, Desember 2010

Haryono, Puji,2005, *Proses Perencanaan Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karang Anyar*, diakses dari Jurnal penyuluhan Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat

Hidayati, Deny, 2016, *Memudarnya Nikai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, diakses dari Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 11 No. 1 Juni 2016

Internet:

kompas. com 19 Agustus 2018

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/>diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.44 wib.

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa/> diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.47 wib.

<http://www.baliprov.go.id/v1/topographi>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 42 WIB.

<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 40 WIB

trtb.pemkomedan.go.id, akses Maret 2017

liputan 6.com, 6 April 2016

suara.com, 4 Februari 2016

www.bbc.com, akses Februari 2017

www.forbali.org, akses Februari 2017

<http://www.walhibali.org/category/tolak-reklamasi-teluk-benoa>

(<http://news.liputan6.com/read/2217360/dprd-bali-izinkan-reklamasi-teluk-benoa-asalkan>, akses Januari 2017).

(<http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/26/susi-jelaskan-kenapa-izin-lokasi-reklamasi-teluk-benoa-diperpanjang>).

(<http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/>)

(<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/13/206753147/its-tolak-tawaran-kajian-reklamasi-teluk-benoa>, akses Pebruari 2017).

(<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/3343> akses tanggal 8 April 2017).

(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569114000052>, Ocean & Coastal Management vol. 92 (2014) 65-73, akses tanggal 9 April 2017) .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014.